



MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

SIAP MENGANTISIPASI DAN MEMITIGASI

Bayang-bayang ketidakpastian akibat pandemi terus mengikuti hingga tahun depan. Namun, pemerintah siap mengantisipasi berbagai kondisi dan memitigasi beragam risiko. RAPBN 2021 menjadi instrumen pemulihan ekonomi sekaligus percepatan reformasi di berbagai bidang. Kobar semangat mewujudkan Indonesia Maju tak boleh padam.



Daftar Isi



COVER STORY:

Pemerintah telah resmi menetapkan RAPBN untuk tahun 2021 yang akan menjadi instrumen perbaikan ekonomi akibat dampak COVID-19. Instrumen memiliki arti sebagai alat untuk mengerjakan sesuatu. Hal ini digambarkan dengan kumpulan alat pertukangan yang biasa digunakan untuk memperbaiki sesuatu. Dengan adanya instrumen ini, diharapkan perekonomian Indonesia dapat menjadi lebih baik pasca pandemi.

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



Foto Cover:

Resha Aditya Pratama

5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

LAPORAN UTAMA

- 8 Ekonomi Dan Pandemi
- 12 Percepat Pemulihan, Perkuat Reformasi
- 16 Infografik
- 18 Bertahan Lewat Kemandirian Pangan
- 20 Jalan Bagi Pemulihan Negeri

PHOTO STORY

- 22 Si Laris Manis Buah Nanas

TEKA TEKI

- 24 Teka Teki Medkeu

WAWANCARA

- 25 Minim Sampah Selama Pandemi

POTRET KANTOR

- 28 Kompensasi di Tengah Keterbatasan

BAGAIMANA CARANYA?

- 31 Bagaimana Cek Status Barang Kiriman dari Luar Negeri

PROFESI

- 32 Para Peracik Pembelajaran Menarik

BUGAR

- 35 Astenopia, Kondisi Mata Lelah Yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja

Opini

- 36 Mengatasi Kesalahpahaman Kebijakan *New Normal* yang Dipilih Pemerintah

Uang Kita Buat Apa

- 38 Jembatan Persatuan dan Kebersamaan

Opini

- 40 Fenomena *Race To The Bottom* Dalam Pajak Internasional

Generasi Emas

- 42 Politik di Tangan Milenial

Lokal

- 44 Mendaki Santai ke Ranu Kumbolo

Finansial

- 46 Uang Dan Pertemanan

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO



SUKUK RITEL SERI SR013

Cintai Negeri dengan Investasi



Masa Penawaran
28 Agt - 23 Sep 2020



Imbal hasil **6,05%** *p.a.*
(fixed rate)



Minimum Pemesanan
Rp1 juta



Dapat diperdagangkan



sukuk ritel

#InvestasiRakyatPenuhManfaat

Pilih Mitra Distribusi Anda!



Dari Lapangan Banteng

Menggandeng Optimisme dan Realitas

Bagaimana hawa pagi di sekitarmu? Beberapa waktu terakhir, udara dingin sering menyusuk badan ketika dini hari menjelang. Puncak musim kemarau nampaknya sudah ada di depan mata. BMKG menuturkan hawa dingin yang terasa saat tengah malam dan bahkan terasa lebih dingin lagi menjelang pagi adalah fenomena penanda puncak musim kemarau tiba. Namun BMKG juga memprediksi puncak kemarau baru akan terjadi di awal September dan udara dingin akan kembali terasa. Itu adalah sebuah prediksi.

Dari perkara prediksi cuaca, kita beralih ke prediksi ekonomi di tahun depan. Meski pandemi masih belum berhenti, pemerintah tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi tahun 2021 yang sudah di depan mata. Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo melalui pidatonya telah menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 pada sidang tahunan MPR/DPR. Nota Keuangan dan RAPBN

2021 berisi prediksi atau asumsi dan target pemerintah yang akan menjadi acuan pelaksanaan berbagai program pemerintah dan pengelolaan keuangan negara di tahun depan.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menegaskan beberapa program yang menjadi fokus pemerintah untuk tahun 2021 mendatang. Program-program tersebut antara lain percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19; reformasi struktural; percepatan transformasi ekonomi menuju era digital; serta pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

Sama halnya dengan ketidakpastian perubahan suhu cuaca antara siang dan malam yang akhir-akhir ini bisa sangat drastis terjadi, RAPBN 2021 ini juga disusun dengan mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia di tahun depan. Meski di tengah situasi yang serba tidak pasti, penyusunan RAPBN 2021 mengusung semangat optimisme namun tetap realistis. Optimisme dan realitas sama-sama diusung dan dituangkan dalam RAPBN 2021. Optimisme tersebut salah satunya

terlihat dari asumsi pertumbuhan ekonomi yang dipatok tumbuh mencapai 4,5 persen - 5,5 persen di tahun depan. Namun demikian, program percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 tetap terus dilakukan.

Nota Keuangan dan RAPBN 2021 adalah dokumen milik bersama, tidak hanya milik Kementerian Keuangan maupun pemerintah saja. Publik atau masyarakat juga diharapkan dapat turut memberikan masukan sekaligus pengawasan dalam pelaksanaannya nanti. Di edisi ini, pembaca dapat memperoleh info lebih detail mengenai isi dari RAPBN 2021. Semoga pengalaman pandemi COVID-19 di tahun ini justru menjadi momentum untuk melakukan perbaikan dan reformasi di berbagai bidang sehingga cita-cita bangsa yaitu mewujudkan Indonesia Maju dapat segera tercapai. Selamat membaca!

Rahayu Puspasari

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Sekretariat Jenderal Kemenkeu



Majalah Media Keuangan
@majalahmediakeuangan

Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian Nota Keuangan beberapa waktu yang lalu menyebutkan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk:

1. percepatan pemulihan ekonomi nasional
2. reformasi struktural untuk meningkatkan

produktivitas, inovasi, daya saing
3. percepatan transformasi ekonomi menuju era digital
4. pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi

Jika menjadi Menteri Keuangan, program mana yang akan Anda beri alokasi anggaran

terbanyak dan mengapa?

@achintyameswari:

Nomor 3, karena dengan terbatasnya ruang gerak kita beberapa bulan terakhir, pandemi menunjukkan bahwa shifting ke teknologi digital makin tak terelakkan jika tak ingin makin tertinggal.

@mike_adty:

1. Percepatan PEN karena belum ada kepastian kapan pandemi berakhir. Perlu percepatan dan berlangsungnya kesinambungan program ini untuk mengurangi dampak ekonomi dan imbasnya bagi masyarakat.



www.kemenkeu.go.id



Kementerian Keuangan RI



@KemenkeuRI



Kemenkeu RI



kemenkeuri



majalahmediakeuangan



DJPPRKemenkeu



DJPPRKemenkeu



djpprkemenkeu



@DJPPRKemenkeu

www.kemenkeu.go.id/sukukritel

Masa Penting Saat Genting

Foto Dok. DPR RI | Teks Anas Nur Huda

Presiden Joko Widodo secara resmi menyerahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beserta Nota Keuangan 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat, 14 Agustus 2020. Dalam pidatonya di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jokowi menyampaikan tahun 2021 menjadi masa yang penting dalam proses akselerasi pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19. Presiden optimis tahun depan merupakan momentum untuk melanjutkan dan memantapkan berbagai reformasi kebijakan untuk mempersiapkan fondasi yang kokoh dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju negara maju.



EKONOMI DAN PANDEMI

Teks Dara Haspramudilla

Melalui kebijakan yang tepat, ada peluang untuk bergerak dengan aman menuju New Normal.

Foto
Anas Nur Huda

Pandemi COVID-19 masih belum berhenti dan terus menjadi tantangan ketahanan ekonomi. Hingga saat ini kondisi dan situasi terkait pandemi masih tidak bisa diprediksi. Untuk itu, berbagai strategi kebijakan dikeluarkan sebagai penyeimbang ekonomi yang guncang. Namun demikian, hasil dari usaha selama ini amat tergantung dari pergerakan musuh tak kasat mata yang sedang kita lawan.

Tidak ada satu ahli di negara mana pun yang mengetahui dengan pasti bagaimana perkembangan virus ini ke depan. Tidak ada yang tahu pasti apakah akan ada obat yang bisa menyembuhkan. Tidak ada yang tahu pasti kapan vaksin untuk penyakit ini bisa ditemukan. Sementara kebijakan pengganggu di tahun 2021 melalui RAPBN 2021 tak bisa lepas dari persoalan dan dinamika yang terjadi di tahun ini. Akan tetapi, pemerintah berupaya optimis dan tetap realistis dalam menentukan program-program tahun depan.

Dono Widiatmoko, Senior Lecture University of Derby, Inggris menyampaikan bahwa ilmu pengetahuan mengenai virus dan penyakit ini masih amat terbatas. “Ilmu kita mengenai COVID-19 di seluruh dunia sama titik nolnya, di bulan Desember. Sampai sekarang belum ada *evidence* yang jelas. Bisa jadi saat ini belum ada *evidence* kita tertular dua kali, tapi kita tidak tahu kedepannya,” terangnya.

Saat ditanya negara mana yang bisa menjadi panutan dalam penanganan pandemi, pria yang mengajar *Health Economic* ini menjelaskan bahwa ada kelebihan dan kekurangan dari strategi tiap negara menghadapi COVID-19.

“Penanganan COVID-19 siapa yang paling benar di dunia ini, tak ada yang tahu. Contohnya New Zealand dengan Swedia, keduanya negara maju. Sementara penanganan COVID-19 keduanya berbeda 180 derajat. New Zealand *full lockdown* sementara Swedia tidak sebab mereka penganut *herd immunity*, tapi orang-orang tua dijaga. Namun, di sisi lain, New Zealand ekonominya mati, Swedia ekonominya jalan, tapi angka kematiannya tinggi. Nah, tergantung kita mau contoh yang mana,” jelasnya.

Memulihkan ekonomi dari gempuran pandemi

Di tengah ketidakpastian ekonomi,

berbagai strategi dan kebijakan dikeluarkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Onny Widjanarko, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, berpendapat ada beberapa kebijakan baik yang telah dan akan dilakukan yang perlu diakselerasi sehingga ekonomi Indonesia dapat pulih lebih cepat.

“Penanganan COVID-19 perlu



dipercepat sehingga aktivitas sosial meningkat dan berimplikasi pada peningkatan aktivitas transaksi ekonomi. Sektor-sektor ekonomi yang dapat berjalan dengan protokol kesehatan perlu dibuka. Perlu percepatan penyerapan anggaran dengan jumlah besar dan inklusif. Selain itu, restrukturisasi kredit terutama UMKM dan perluasan pemanfaatan digital juga merupakan pilihan yang tepat,” tutur Onny.

Hal senada juga disampaikan oleh Ralph Van Doorn, Senior Economist

World Bank. Menurutnya, bangkitnya ekonomi di tengah ketidakpastian dapat dilakukan dengan menciptakan situasi yang kondusif bagi investasi, perdagangan dan inovasi dan meningkatkan kemampuan para pekerja melalui program Kartu Prakerja.

Ia juga menambahkan bahwa upaya Indonesia untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur perlu dilanjutkan sebab hal tersebut merupakan strategi kunci dalam pemulihan ekonomi paskapandemi. Selain itu, meratakan kurva utang juga perlu dilakukan sebab pembayaran bunga yang meningkat akan mengurangi ruang fiskal.

Melonggarkan PSBB, membuka ekonomi

Dengan pelonggaran PSBB, kegiatan ekonomi mulai bergerak dan berdampak positif. Namun di sisi lain, hal ini berisiko menurunkan status kewaspadaan terhadap COVID-19. Menurut Ralph banyak negara, termasuk Indonesia, telah menghadapi *trade-off* antara memperlambat penyebaran COVID-19 dan mempertahankan aktivitas ekonomi. Melalui kebijakan yang tepat, ada peluang untuk bergerak dengan aman menuju *New Normal*.

“Ada beberapa langkah konkret bagi Indonesia agar bisa mendapatkan peluang terbaik dalam membuka kembali perekonomian. Pemerintah harus fokus dalam memperluas kapasitas laboratorium pengujian, mengintegrasikan sistem informasi untuk pengawasan, mengumpulkan data dengan baik sehingga tingkat pandemi dapat diukur lebih akurat, memastikan ketersediaan dan kesiapan layanan kesehatan termasuk produksi dan distribusi vaksin COVID-19,” tambahnya.

Sementara itu, Dono menyatakan bahwa efektivitas PSBB juga diragukan. Ia melakukan penelitian evaluasi PSBB dari beberapa variabel seperti *google mobility report*, ojek online dan jumlah polutan udara di Jakarta.



“PSBB pasti ada pengaruhnya tapi besar atau kecilnya tergantung. Ada beberapa daerah yang sukses seperti Pekalongan, Malang, dan Banyumas, tapi sekarang bocor juga. Mengapa? Sebab, kita butuh menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dengan kesehatan. Maka kita perlu mengakomodasi ekonomi berjalan dengan tetap menjaga prinsip pencegahan penularan penyakit,” tuturnya.

Alokasi anggaran untuk pandemi

Ralph menilai langkah yang diambil Pemerintah Indonesia untuk mengakselerasi belanja produktif di sektor kesehatan, bantuan sosial dan dukungan terhadap industri dianggap tepat.

“Bantuan sosial penting agar masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan pendapat tidak jatuh dalam jurang kemiskinan. Sebab, tanpa program tersebut, kami memprediksi sebanyak 5,5 -8 juta masyarakat Indonesia akan masuk ke dalam garis kemiskinan. Namun, penting agar program tersebut diberikan tepat sasaran. Data memperlihatkan bahwa penyaluran program PKH dan Kartu Sembako sudah sesuai, tetapi efektivitas penyaluran BLT Desa dan Kartu Pra Kerja masih perlu ditingkatkan terutama menghilangkan

aspek-aspek yang memperlambat pencairan,” jelasnya.

Membahas mengenai alokasi anggaran, Dono menyampaikan perspektifnya bahwa selama ini mayoritas anggaran kesehatan sebaiknya tak hanya dialokasikan pada anggaran kuratif saja namun juga perlunya fokus pada program preventif dan promotif.

“Seharusnya yang menjadi prioritas adalah anggaran preventif dan promotif sebab penyakit ini (COVID-19) fokusnya adalah disiplin agar kita lebih sehat dan bisa lebih imun. Saat ini, akibat COVID-19 ada beberapa masalah kesehatan yang terabaikan dan itu yang terkait dengan pencegahan seperti *pre-natal care* dan imunisasi dengan tutupnya posyandu. Maka, saya mohon agar semua yang ada urusannya dengan investasi manusia di masa depan diproteksi”, ujar Dono.

Proyeksi kondisi ekonomi ke depan

Jika terjadi gelombang kedua COVID-19 di Indonesia, Ralph memperkirakan ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi yang lebih dalam dari ekonomi global sebesar 7,8 persen pada tahun 2020 dibandingkan dengan skenario dasar World Bank yaitu kontraksi 5 persen.

“Jika ada gelombang kedua dan

diikuti pembatasan mobilitas skala besar di kuartal III dan IV maka diprediksi ekonomi Indonesia akan berkontraksi sebanyak 2 persen pada tahun 2020. Selain itu, efek yang lebih terasa adalah hilangnya pendapatan dari konsumsi dan investasi,” paparnya.

Sementara itu, Onny menyatakan optimismenya bahwa ekonomi Indonesia dapat tetap terjaga dan dipertahankan untuk tumbuh positif di tengah pandemi.

“Pemerintah sudah bertekad dan *all out* agar negara kita tidak mengalami pertumbuhan negatif di sisa kuartal tahun 2020 ini. Ditambah lagi dengan melihat tema APBN 2021 yakni Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. RAPBN 2021 disusun saat kondisi ekonomi global dan domestik mengalami tekanan dan tantangan luar biasa. Menurut kami, kebijakan yang diambil sudah pas,” ujarnya.

Tak dipungkiri lagi, tahun 2020 menjadi tahun yang penuh gejolak. Namun demikian, Pemerintah terus memahat optimisme salah satunya melalui APBN 2021 yang didisain sebagai instrumen percepatan pemulihan ekonomi paskapandemi. Apa saja strategi pemerintah tahun depan, simak di laporan utama berikutnya.

PERCEPAT PEMULIHAN, PERKUAT REFORMASI

Teks Reni Saptati D.I

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 menjadi berbeda dari biasa. Negeri masih dilanda pandemi. Sekuat tenaga upaya dikerahkan agar pandemi segera teratasi. Namun, ketidakpastian masih tinggi, bahkan di beberapa daerah pertumbuhan kasus baru terus terjadi. Pemerintah harus memantapkan langkah antisipasi untuk memitigasi dampak sosial ekonomi di tahun depan.

Pada 14 Agustus 2020 lalu, pemerintah telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN tahun anggaran 2021 dan Nota Keuangan. Kebijakan fiskal RAPBN 2021 mengambil tema Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Ubaidi S. Hamidi mengemukakan setidaknya ada dua hal yang melatarbelakangi pemilihan tema.

“Pertama, pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia telah berdampak sangat luar biasa bagi kesehatan masyarakat dan perlambatan perekonomian dalam tahun 2020,” tutur pria kelahiran Klaten tersebut. Sumber daya fiskal perlu diarahkan untuk mendukung keberlanjutan dan akselerasi berbagai upaya strategis pemulihan kondisi kesehatan dan perekonomian nasional yang telah mulai dilakukan sejak 2020, dan akan dilanjutkan pada 2021.

“Kedua, langkah menuju Visi Indonesia 2045 sebagai negara maju tetap perlu diperjuangkan bersama,” tegas Ubaidi. Guncangan perekonomian nasional tahun ini tidak menyurutkan langkah pemerintah untuk tetap mewujudkan cita-cita luhur yaitu masyarakat yang semakin sejahtera, serta bagaimana berupaya untuk keluar dari *middle income trap*.

Ia menjelaskan, pemulihan ekonomi akan bermakna jika dilengkapi dengan reformasi struktural yang konsisten. Sebaliknya, reformasi akan berjalan efektif jika didukung proses pemulihan ekonomi yang solid. “Strategi *recovery* ekonomi dan reformasi merupakan satu paket, *two in one*, yang komplementer dan saling menguatkan, agar dari sisi

kesehatan-sosial-ekonomi dapat segera pulih menuju normal,” ujar Ubaidi yang sebelum bertugas di BKF, selama belasan tahun bertugas di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Program pemulihan ekonomi nasional berlanjut

Reformasi yang akan dilaksanakan pada 2021 meliputi banyak sektor. Untuk mendukung pemulihan melalui penguatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, alat kesehatan, serta mendorong *health security preparedness*, reformasi sektor kesehatan akan digalakkan. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan reformasi perlindungan sosial untuk mendukung pemulihan sekaligus mempersiapkan program yang adaptif terhadap resesi ekonomi dan bencana. Ubaidi menjelaskan, fokus reformasi juga akan diarahkan ke sektor pendidikan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), perpajakan, penganggaran, dan optimalisasi teknologi informasi melalui digitalisasi layanan publik.

“Dalam rangka menjawab tantangan struktural terkait perlunya penguatan daya saing, peningkatan kapasitas produksi dan pemanfaatan bonus demografi untuk mendukung produktivitas dan transformasi ekonomi, maka diperlukan reformasi untuk penguatan fondasi agar mampu keluar dari *middle income trap*,” Ubaidi menerangkan.

Tahun depan, jelasnya, pemerintah juga tetap akan melanjutkan penanganan bidang kesehatan terutama pandemi COVID-19 serta mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. “Pemerintah akan memberikan stimulus ekonomi yang berkeadilan, tepat sasaran,

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPRD di Gedung Parlemen.

Foto
Dok. DPR RI

dan produktif dengan fokus pada sektor informal, UMKM, petani, nelayan, sektor korporasi, dan BUMN yang memiliki peran strategis bagi masyarakat,” ujar Ubaidi.

Langkah lain yang akan diterapkan yakni menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan efektivitas perlindungan sosial, memperkuat kebijakan dalam pengendalian impor khususnya pangan, serta meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).

Empat pilar kebijakan teknis perpajakan

Terjadinya perlambatan aktivitas ekonomi menjadi tantangan bagi pendapatan negara. Kinerja ekspor dan impor melemah, begitu pula dengan konsumsi dan investasi yang turut menurun. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Ihsan Priyawibawa mengatakan, pada tahun 2021, pemerintahan akan melakukan optimalisasi pendapatan yang inovatif dan mendukung dunia usaha untuk pemulihan ekonomi.

“Dari sisi perpajakan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya perluasan basis pajak, dan perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan *tax ratio*,” tutur Ihsan. Lanjutnya, penerapan Omnibus Law Perpajakan dan pemberian berbagai insentif fiskal juga diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan daya saing nasional, mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, serta memacu transformasi ekonomi.

“Kebijakan teknis pajak yang akan diimplementasikan pada tahun 2021 dapat dikategorikan menjadi empat pilar kebijakan besar,” ungkap Ihsan. Pertama, mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan yang selektif dan terukur. Kedua, memperkuat sektor

strategis dalam rangka transformasi ekonomi antara lain melalui terobosan regulasi, pemberian insentif pajak yang lebih terarah, dan proses bisnis layanan yang *user friendly* berbasis IT.

Pilar ketiga ialah meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan. Sementara, pilar terakhir ialah mengoptimalkan penerimaan pajak. Langkah ini akan diimplementasikan dalam bentuk pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), serta ekstensifikasi dan pengawasan berbasis individu dan kewilayahan. Selain itu, pemerintah juga akan meneruskan reformasi perpajakan yang meliputi bidang organisasi, SDM, dan IT.

Menurut Ihsan, selama ini sektor industri pengolahan dan perdagangan menjadi penyumbang utama penerimaan pajak. Terkait dengan basis pajak baru, ia menerangkan, dari sisi aspek subjek pajak, pendekatan kewilayahan menjadi fokus utama DJP. “Adapun dari aspek objek pajak, salah satunya adalah dengan meng-*capture* objek pajak dari aktivitas PMSE yang semakin marak seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini,” pungkasnya.

Pembiayaan fleksibel dan responsif

Penyusunan RAPBN 2021 masih belum terlepas dari situasi pandemi. Oleh sebab itu, sektor pembiayaan harus tetap antisipatif terhadap kebutuhan APBN dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi. Hal tersebut disampaikan Direktur Strategi dan Portofolio Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Riko Amir, dalam kesempatan wawancara dengan Media Keuangan.

“Untuk arah kebijakan pembiayaan tahun depan, pembiayaan tetap fleksibel dan responsif terhadap kondisi pasar keuangan, tetapi juga tetap *prudent* dan memperhatikan kesinambungan

fiskal,” terang Riko. Pihaknya juga terus berupaya mengembangkan skema pembiayaan yang kreatif dan inovatif, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

“Nah, yang paling penting, pada 2021 juga harus ada efisiensi terhadap biaya utang itu sendiri,” kata Riko yang merupakan alumnus University of Groningen tersebut. Untuk tahun depan, pihaknya akan mendorong biaya bunga utang bisa makin efisien, seiring dengan pendalaman pasar keuangan, perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur Surat Berharga Negara (SBN) itu sendiri, serta diversifikasi pembiayaan.

“Indonesia tidak bisa mengelak dari pandemi ini. Oleh karena itu, pemerintah melakukan kebijakan *counter cyclical* di mana ketika pertumbuhan ekonominya menurun, pemerintah melakukan berbagai cara untuk membantu *boosting* ekonomi,” ujar Riko.

Di sisi lain, Riko mengungkapkan sejumlah lembaga pemeringkat utang melihat Indonesia telah melakukan kebijakan *on the right track* dan mampu menjaga stabilitas makroekonominya. Pada bulan Agustus lalu, salah satu lembaga pemeringkat utang yaitu Fitch mempertahankan peringkat utang Indonesia pada posisi BBB dengan *outlook stable*.

Fitch mengapresiasi pemerintah lantaran telah merespons krisis dengan cepat. Mereka menilai pemerintah telah mengambil beberapa tindakan sementara yang luar biasa, meliputi penangguhan tiga tahun dari plafon defisit 3 persen dari PDB dan pembiayaan bank sentral langsung pada defisit. “Penilaian tersebut menjadikan pemerintah lebih *confidence* dalam menjalankan peran untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah pandemi ini,” pungkas Riko Amir.



Podcast Media Keuangan

Dengarkan serunya wawancara bersama para narasumber pilihan Media Keuangan

PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAN PENGUATAN REFORMASI

Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian Nota Keuangan pada tanggal 17 Agustus 2020 menyebutkan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional, reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, daya saing, percepatan transformasi ekonomi menuju era digital, dan pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

Seperti apa detail pokok-pokok kebijakan RAPBN 2021?

ASUMSI MAKRO



Pertumbuhan Ekonomi

dapat tumbuh 4,5% - 5,3%



Inflasi

terkendali di kisaran 3,0%



Nilai Tukar Rupiah (per USD)

berada di Rp14.600



Suku Bunga SPN 10 Tahun

diperkirakan 7,29 %



Harga Minyak Mentah

rata-rata per hari USD45



Lifting Minyak

diperkirakan 705 ribu barelbarel



Lifting Gas

setara minyak per hari 1.007 ribu barel

*) Suku bunga SBN 10 tahun menggantikan suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2021

PENDAPATAN NEGARA

RAPBN 2021



Rp1.776,4 T

Outlook 2020



Rp1.669,9 T

BELANJA NEGARA

RAPBN 2021



Rp2.747,5 T

Outlook 2020



Rp2.739,2 T

PEMBIAYAAN NEGARA

RAPBN 2021



Rp971,2 T

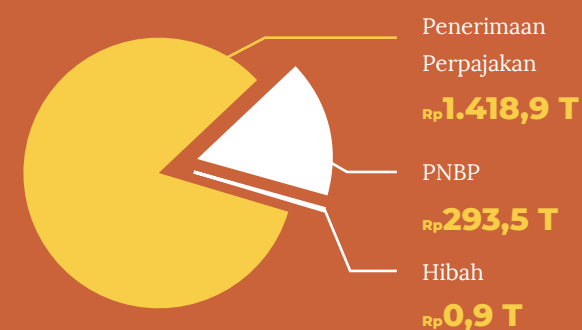
Outlook 2020



Rp1.039,2T

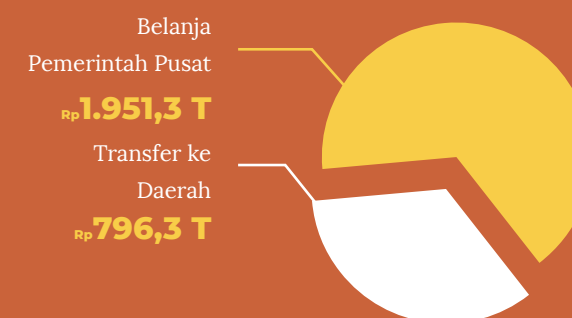
Pendapatan Negara

Rp1.776,4 T



Belanja Negara

Rp2.747,5 T



Pembiayaan Anggaran

Rp971,2 T

Rp(169,1) T

Pembiayaan Investasi

BERTAHAN LEWAT KEMANDIRIAN PANGAN

Teks Dimach Putra

Pandemi COVID-19 mulai berimbas ke ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2020 hingga mengakibatkan kontraksi mencapai 5,32 persen. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) turun di seluruh sektor. Satu sektor tetap bertahan positif. Bahkan Presiden meminta agar sektor ini diprioritaskan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangan pers seusai "Rapat Terbatas Rancangan Postur APBN

Tahun 2021" menyampaikan empat hal prioritas dalam RAPBN 2021 sesuai amanat dari Presiden Joko Widodo. Prioritas dalam RAPBN 2021 itu meliputi ketahanan pangan, pembangunan kawasan industri, peningkatan dan pemerataan konektivitas digital teknologi informasi dan komunikasi (ICT), serta pendidikan dan kesehatan.

"Prioritas ini yang akan kita dukung untuk penambahan belanja, yakni pertama dari sisi ketahanan pangan sebagai prioritas paling tinggi," ungkap Menkeu melalui sambungan daring *video conference*.

Ketahanan pangan telah menjadi mimpi Indonesia sejak lama, bahkan dari masa presiden-presiden terdahulu. Presiden Joko Widodo sendiri pun memasukkannya menjadi salah satu agenda dalam Nawacita. Sejatinnya hal ini sudah menjadi mimpi bersama dan hal yang berkesinambungan bagi bangsa Indonesia. Tapi baru kali ini gaung ketahanan pangan kembali terdengar nyaring.

Dalam memprioritaskan sektor ketahanan pangan, Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp. 104,2 triliun

Foto
Resha Aditya P

Setelah sektor ini berhasil bertahan menancapkan kukunya kuat-kuat meski sektor usaha lain tergilas oleh pagebluk.

Dalam pidato penyampaian RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan di hadapan anggota dewan, Presiden menegaskan keseriusan pemerintah dalam memprioritaskan sektor ketahanan pangan. Alokasi anggaran untuk sektor tersebut sebesar Rp104,2 triliun. Presiden juga menyampaikan tiga program utama untuk mencapai ketahanan pangan. Fokus utama yaitu mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana dan prasarana serta dan penggunaan teknologi. Kedua, revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani, nelayan dan distribusi pangan. Langkah ketiga adalah pengembangan *food estate* untuk meningkatkan produktivitas pangan.

Peluang di sektor pangan

Penempatan ketahanan pangan sebagai program prioritas dalam RAPBN 2021 bukan tak berdasar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto (PDB) di sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II 2020. PDB pertanian tumbuh 16,24 persen pada kuartal II 2020 (q to q) dan bahkan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 (yoy), sektor pertanian tetap berkontribusi positif yakni tumbuh 2,19 persen. Pada kuartal kedua tahun ini, hanya sektor pertanian yang masih tumbuh secara positif, sementara sektor lainnya lesu.

Menurut Agung Hendriadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan), tumbuhnya sektor pertanian tak lepas dari kebutuhan

dasar manusia. Manusia butuh makan untuk bertahan hidup. Terlebih para ahli sedang gencar mengingatkan pemenuhan nutrisi agar imun tubuh meningkat menghadapi virus yang sedang berkeliaran. "Kita bisa menahan untuk tidak beli ini dan itu, tapi tidak bisa jika tidak makan. Artinya bahwa pasar dari sektor pertanian masih akan tetap tumbuh positif," ungkapnya yakin.

"Dari 11 komoditas pangan pokok, kita masih aman dalam sisi produksi dan cadangan pangan hingga pertengahan tahun depan," beber Agung menyebutkan kondisi ketahanan pangan nasional saat ini. Dari 11 komoditas pokok tersebut yang sebagian masih harus dipenuhi dari impor adalah bawang putih dan daging sapi atau lembu. Ia meyakinkan bahwa pemenuhan kebutuhannya sejauh ini belum terdampak meski lalu-lintas perdagangan global agak tersendat karena pandemi COVID-19. Meski begitu, pihaknya tetap waspada. "Kita tidak tahu kapan (pandemi) berakhir, makanya koordinasi dengan berbagai pihak terkait terus kita kerjakan dalam pemenuhan kebutuhan pangan secara lebih mandiri," ungkapnya.

Perlahan mencapai ketahanan pangan

Kementan akan tetap berfokus untuk menjaga pasokan 11 komoditas pangan pokok. Peningkatan produksi pada tiap komoditas masih menjadi fokus utama. Selain itu, Kementan juga tengah gencar mempromosikan program yang telah lama ada, yaitu Pekarangan Pangan Lestari, yang meningkat popularitasnya seiring bertambahnya minat masyarakat berkebun di rumah semasa pandemi. Upaya tersebut juga dibantu dengan sosialisasi mengenai diversifikasi bahan pangan lokal, termasuk diversifikasi protein hewani untuk menekan angka ketergantungan kebutuhan daging sapi yang sebagian masih harus dipenuhi oleh impor. Selain itu, inseminasi buatan dan impor indukan dilakukan untuk menambah populasi ternak yang ada.

Salah satu cara yang harus ditempuh untuk mencapai ketahanan pangan adalah penambahan luas lahan

tanam. Pembangunan food estate menjadi topik yang paling hangat diperbincangkan dalam hal ini. Sebidang tanah di Kalimantan Tengah seluas 600ribu hektare telah siap digarap bertahap. Tanah seluas 30 ribu hektare menjadi target pertama yang harus digarap pada periode 2020-2021. "Hasilnya nanti menambah pasokan dari 7,46 juta hektar lahan baku sawah yang sudah kita punya," ucap Agung.

"Agar (ekonomi) bisa tumbuh 4,5-5,5 persen di tahun 2021, pemerintah juga akan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur. Hal ini juga mendukung program ketahanan pangan." imbu Askolani, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa ketahanan pangan juga bergantung pada infrastruktur pendukung, seperti irigasi yang cukup. Sistem irigasi dibangun diantaranya dari pembangunan bendungan atau embung. Selain itu, konektivitas antardaerah akan mendukung distribusi bahan pangan yang lebih merata. "Nah, dua paket kebijakan ini tidak bisa dipisahkan, antara prioritas ketahanan pangan dan juga pembangunan infrastruktur," ucapnya.

Membangun ketahanan pangan nasional adalah sebuah proses yang berkesinambungan. Kesadaran akan hal tersebut harus dimulai dari tingkat keluarga. Jika tiap keluarga di Indonesia telah memiliki kesadaran tersebut tentu akan berpengaruh ke lingkungan yang lebih besar seperti desa, lalu ke tingkat kabupaten atau kota, naik ke level provinsi, hingga akhirnya secara nasional. Namun menurut Agung, intervensi pemerintah tetap diperlukan sampai level provinsi. "Contohnya dalam peningkatan distribusi pangan dari daerah yang surplus ke daerah yang kekurangan. Itu perlu, selain juga terus melakukan program-program kami yang telah saya sebutkan tadi," pungkas Agung.

JALAN BAGI PEMULIHAN NEGERI

Teks OS. Purwowidhu | Foto Dok. Media Keuangan

Pantang menyerah menghadapi kesamaran situasi imbas pandemi, pemerintah memanfaatkan bencana nonalam ini sebagai momentum untuk membenahi diri dan mengakselerasi pembangunan di segala lini, demi kebaikan negeri. Semangat itu pun menggelora dalam RAPBN 2021. Simak petikan wawancara Media Keuangan dengan Direktur Jenderal Anggaran, Askolani, mengenai seluk beluk RAPBN 2021.

Apa yang menjadi fokus pemerintah dalam mendesain RAPBN 2021?

Dalam menyusun RAPBN 2021, tentunya pemerintah berbasis kepada kondisi dan langkah kebijakan di 2020 ini. Penanganan masalah kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi menjadi satu paket kebijakan yang harus didesain secara komprehensif dan sinergis. Upaya preventif di bidang kesehatan adalah kunci penting. *Next step*nya untuk kita maju adalah bagaimana kembali memulihkan ekonomi itu secara bertahap di tahun 2021. Langkah kita di Q2, Q3, dan Q4 ini sangat menentukan pijakan ke depan.

Tantangan kita bagaimana supaya langkah-langkah pemulihan

ekonomi, konsolidasi, dan upaya mendorong belanja pemerintah, bisa menstimulus pertumbuhan ekonomi di Q3 menjadi lebih positif.

Bagaimana upaya pemerintah untuk mengejar penyerapan di Q3 dan Q4?

Implementasi kombinasi *adjustment* pola belanja, baik melalui kebijakan realokasi dan *refocusing* belanja K/L dan pemda maupun tambahan belanja untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang harus dilakukan oleh semua *stakeholder* terkait, sangat menentukan capaian di Q2, Q3, dan Q4. Sampai dengan awal Q3 di bulan Juli, sebagian besar sudah cukup signifikan implementasinya. Tantangan kita adalah percepatan alokasi dan implementasi sisa anggaran PEN.

Langkah percepatan antara lain dilakukan melalui koordinasi yang lebih intens dengan K/L dan Komite PEN untuk mendesain kebijakan implementatif PEN yang akan dilakukan ke depan. Presiden juga turut serta mereview PEN bersama dengan para menteri di sidang kabinet. Presiden secara tegas mengingatkan para menterinya untuk turun langsung, membedah DIPA-nya masing masing untuk mereview

bagaimana mempercepat belanja sesuai alokasi anggaran mereka di APBN 2020, maupun mengoptimalkan belanja anggaran program PEN yang harus dijalankan *stakeholder* terkait.

Adakah upaya penyempurnaan sistem penganggaran ke depan?

Ada. Pertama, kita memperpendek mekanisme proses *review* atas usulan anggaran K/L sehingga dapat mempersingkat waktu penetapan DIPA-nya. Kedua, kita mensimplifikasi proses verifikasi kelengkapan dokumen. Jadi, kami akan meminta K/L untuk mendahulukan melengkapi dokumen yang memiliki skala prioritas tinggi. Ketiga, kami akan proaktif meminta dan mengomunikasikan kepada K/L untuk melakukan akselerasi dalam melengkapi dokumen usulan anggaran. Kita akan tuangkan ini dalam peraturan Menteri Keuangan dan SOP agar sistem ini menjadi landasan yang lebih *sustainable*. Kita juga akan terus melakukan evaluasi dan apabila ada modifikasi untuk lebih mempercepat mekanisme yang ada, akan kami lakukan.

Bagaimana dengan reformasi bidang anggaran di 2021?

Kemenkeu menyiapkan

reformasi desain anggaran, lalu kita juga mengajak Bappenas untuk mendesain program anggaran tersebut. Jadi, format alokasi belanja K/L di tahun 2021 nanti akan mengadopsi desain anggaran yang baru yang programnya lebih simpel, lebih *eye catching*, dan lebih mudah diterapkan. Ini kita koneksikan juga dengan target prioritas pembangunan sesuai arahan Presiden dan rencana kerja pemerintah.

Penguatan reformasi lainnya yang akan pemerintah lakukan?

Pandemi ini memberi banyak *lesson learn* pada kita, yang menjadi masukan untuk perbaikan reformasi di berbagai bidang. Contohnya, manajemen di bidang kesehatan harus bisa lebih proaktif dan antisipatif terhadap model bencana nonalam ini. Di bidang perlindungan sosial dan dukungan UMKM, perbaikan pendataan masyarakat menengah ke bawah menjadi kunci. Pemerintah juga sedang memikirkan bagaimana mensinergikan antara kebijakan subsidi dengan kebijakan perlindungan sosial yang kemudian semua di *support* dengan satu data yang solid dan valid.

Lalu ada juga reformasi perpajakan, baik dari segi regulasi, kebijakan, dan administrasinya. Nah, *on top* dari semua itu, pemerintah tentunya juga akan menyiapkan reformasi mengenai penanganan bencana.

Seperti apa prioritas belanja pemerintah dalam RAPBN 2021?

Pemerintah tetap memprioritaskan kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan. Penanganan kesehatan lanjutan diarahkan lebih *sustainable* seperti upaya preventif melalui penyediaan vaksin apabila nanti sudah ditemukan, dan reformasi di bidang kesehatan. Program perlindungan sosial juga tetap berjalan misalnya dalam bentuk PKH, kartu sembako, bantuan tunai, plus kartu prakerja dan program subsidi. Di sektor pendidikan, pemerintah memperkuat mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, *even* program beasiswa untuk S2, S3 tetap akan dilanjutkan di tahun depan.

Nah, setelah tiga bidang tadi, pemerintah juga langsung satu paket mendukung untuk pemulihan ekonomi. Pertama, melalui penyiapan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang menjangkau sampai ke daerah 3T guna membangun manusia Indonesia yang lebih produktif dan kompetitif. Teknologi ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pendidikan, serta ekonomi masyarakat, terlebih dalam kondisi kita tidak bisa bertemu fisik. Perluasan pembangunan ICT ini sudah dirancang sampai jangka menengah.

Selanjutnya pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan. Keduanya tidak dapat dipisahkan sebab pangan ini harus didukung misalnya dengan irigasi yang cukup dan bendungan yang baik. Yang menjadi prioritas juga adalah pemulihan pariwisata karena ini salah satu andalan utama kita. Dukungan pariwisata dilakukan oleh banyak K/L dan pemda, bukan hanya Kemenpar. Kemudian yang terakhir yang kita prioritaskan juga adalah dukungan bagi dunia usaha dan UMKM, baik melalui insentif fiskal maupun skema subsidi.

Apakah nantinya alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) juga akan mendukung belanja prioritas ini?

Ya, kita juga mereformasi alokasi

TKDD. Kebijakan belanja yang di pusat tadi kemudian *diconnecting* dengan kebijakan alokasi TKDD. Dana desa misalnya diarahkan khususnya untuk perlindungan sosial dan mendukung ICT di desa. Reformasi kesehatan dan pendidikan juga dikaitkan dengan kebijakan alokasi TKDD. Jadi ini kita melihatnya sebagai satu paket.

Bagaimana prioritas dari sisi pembiayaan?

Dari sisi pembiayaan juga kita akan terus dukung untuk peningkatan kualitas SDM melalui pembiayaan dana abadi, baik itu untuk LPDP, beasiswa, maupun untuk universitas termasuk untuk kebudayaan. Di pembiayaan ini kita juga akan *support* BUMN untuk bisa mendukung penugasan pemerintah termasuk melanjutkan pemulihan ekonomi di tahun 2021.

Apa implikasi dari defisit 5,5 persen di RAPBN 2021?

Dengan 5,5 persen intinya adalah secara fiskal pemerintah tetap ekspansif untuk mendukung penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi. Ini pijakan kita untuk bisa menjadikan Indonesia maju dan keluar dari *middle income trap*. Visi kita di 2045 Indonesia masuk lima besar negara di dunia. Penurunan defisit ini juga sejalan dengan UU 2/2020 bahwa secara bertahap defisit APBN itu akan dikembalikan menjadi dibawah 3 persen di tahun 2023.

Apa yang membuat pemerintah optimis mematok pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen di 2021?

Tentunya efektivitas kebijakan PEN di 2020 ini menjadi pijakan ke depan ya. Kemudian dengan langkah fiskal ekspansif sebagaimana dalam RAPBN 2021, plus prediksi sejumlah lembaga internasional mengenai pemulihan ekonomi dunia di 2021, kita mendesain ekonomi kita tumbuh 4,5-5,5 persen di 2021.



Si Laris *Manis* Buah Nanas

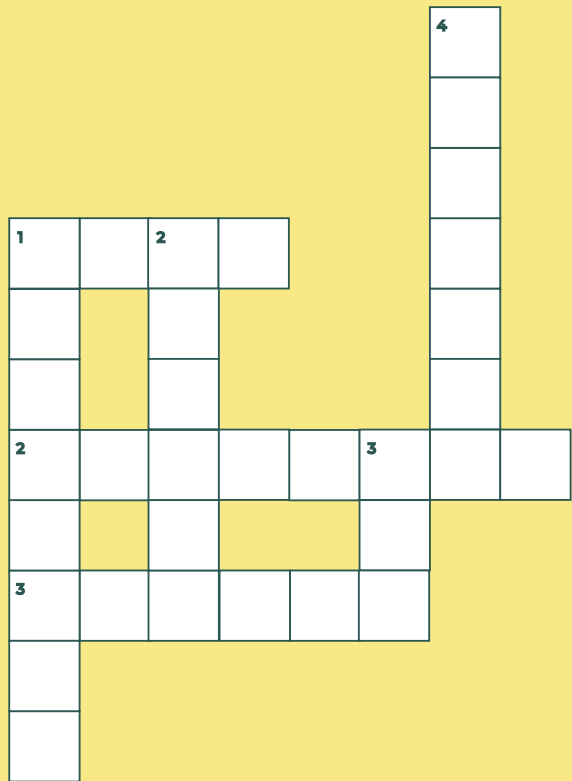
Foto Abdul Aziz | Teks Resha Aditya P

Selain terkenal dengan gajahnya, Kota Lampung juga terkenal akan produksi dan pengolahan buah nanas. Dengan luas perkebunan sekitar 33.000 hektare, buah nanas dipanen hingga 3.500 ton. Buah nanas dipanen dan diolah menjadi bentuk kaleng setiap harinya. Saat ini, Kota Lampung menjadi pengekspor nanas terbesar di dunia dan telah diekspor ke lebih dari 60 negara.



ka *Teki
Med

*Teka *Teki
Medken



Mendatar

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Surat Utang
3. Nama depan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Menurun

1. Direktur Jenderal Anggaran yang menjabat saat ini
2. Surat keputusan (ragam cakapan, KBBI)
3. Harapan
4. Nama belakang Menteri Keuangan kedua Republik Indonesia

Kirim jawaban Anda melalui story post instagram dengan tag IG @majalahmediakeuangan atau melalui email mediakeuangan@kemenkeu.go.id, sertakan nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi

Jawaban kami tunggu sampai tanggal 10 September 2020.

*Teka *Teki
un

Minim Sampah Selama Pandemi

Teks Reni Saptati D.I | Foto Dok. Pribadi

Menumpuknya sampah sudah jadi persoalan lama di negeri ini. Beragam gagasan muncul, baik dari sisi masyarakat maupun pemerintah, sebagai solusi bagi persoalan yang mengancam masa depan bumi dan manusia ini. Salah satu komunitas yang gencar mengkampanyekan budaya minim sampah adalah Kota Tanpa Sampah. Demi masa depan lestari, mereka meyakini seluruh kalangan perlu terlibat menyelesaikan persoalan sampah.

Upaya meminimalkan sampah jadi kian pelik karena serangan pandemi. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada Juli 2020 lalu menyebut terjadi peningkatan sampah selama pandemi, terutama sampah plastik. Bagaimana saran komunitas Kota Tanpa Sampah agar masyarakat tetap dapat menerapkan praktik minim sampah selama pandemi? Media Keuangan mendapat kesempatan berbincang dengan Co-Founder Kota Tanpa Sampah, Wilma Chrysanti. Simak perbincangannya berikut ini.





Bagaimana awal mula lahirnya gerakan Kota Tanpa Sampah?

Kota Tanpa Sampah merupakan sebuah inisiatif dan eksperimen sosial yang dimulai sejak awal 2015. Kami coba mengajak warga di sekitar studio kami untuk aktif mengembangkan pengetahuan dan praktik di keseharian yang berkesadaran ekologis dan minim sampah.

Riset dan eksperimen bersama warga ini dilakukan untuk melihat produksi sampah di rumahnya. Dari situ, terlihat bahwa persoalan sampah bukan tentang bersih kotor saja. Sampah

muncul ketika ada yang salah dari cara kita memproduksi atau mengonsumsi.

Selama ini, permasalahan sampah hanya dilihat di belakang, atau pascakonsumsi dan pascaproduksi. Kita hanya berkutat di seputar bagaimana membersihkan atau melenyapkan sampah yang sudah terlanjur dihasilkan, seperti sampah di jalanan, sungai, laut, atau yang menumpuk di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Nah, ini mengapa masalah sampah dari tahun ke tahun tidak selesai, sebab solusinya hanya di persoalan itu saja.

Kemudian, kami mengembangkan

strategi rumah minim sampah yang mengintervensi di tiga tahap, yaitu tahap pra, saat, serta pascaproduksi dan konsumsi. Namanya strategi pintu depan, strategi pintu tengah, dan strategi pintu belakang. Kami merumuskan modul rumah minim sampah dan menantang warga untuk hidup minim sampah selama 7-14 hari hanya dengan menjalankan strategi tiga pintu tersebut. Hasilnya, sampah bisa dikurangi antara 40-99,9 persen di tiap rumah warga pelopor yang mengikuti eksperimen.

Adakah tantangan yang dihadapi dalam memulai gerakan Kota Tanpa Sampah?

Tantangannya ada dan rata-rata hampir sama. Warga terlanjur merasa nyaman dan praktis. Hanya dengan membayar Rp25.000, urusan sampah beres. Jadi, mereka berpikir kenapa mesti repot mengurus sampah.

Pendapat lainnya, ini kan tanggung

jawab pemerintah, atau ini kan tanggung jawab produsen. Ada juga yang berpikir kalau sampah berkurang, bagaimana nasib pemulung. Banyak pendapat, dan sebenarnya bisa satu persatu kita diskusikan agar ada jalan keluarnya.

Selama pandemi ini tercatat terjadi peningkatan sampah. Bagaimana pandangan Anda terhadap kondisi ini?

Pada awal pandemi, banyak pihak menggeser urgensinya. Mereka mendahulukan pencegahan dan penanganan COVID-19, mengutamakan masalah kebersihan dan hygiene. Sebenarnya ini bisa jadi kesempatan baik untuk mengingatkan kembali usaha dan upaya yang sudah ada. Seharusnya ini direspons bersama oleh semua pihak.

Misalnya begini, dalam membuat panduan komprehensif dalam pencegahan dan penanganan COVID-19, kita tidak hanya memasukkan masalah hygiene, tetapi juga sekaligus memikirkan apa-apa yang dilakukan agar sisa konsumsi dan produksinya tetap minim sampah. Dari sisi pemerintah, dengan kondisi anggaran yang berkurang, seharusnya juga membuat satu skema yang tidak mengalihkan prioritas lain. Bisa jadi, masalah sampah yang dikesampingkan ini akan jadi bencana berikutnya bila konsentrasi hanya di satu masalah saja.

Wajar jika di satu dua bulan awal kita kaget dan memilih plastik, misalnya, untuk tujuan kesehatan. Namun, harusnya ada penyesuaian. Kita harus mulai bangkit dan mencari alternatif kemasan atau sistem lain yang tidak terus menerus mengandalkan kemasan sekali pakai. Seharusnya kita tidak terlena dengan keadaan ini. Bangkit lagi bersama-sama, tidak hanya warga, tetapi juga komunitas, produsen, juga pemerintah.

Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan masyarakat supaya tetap bisa minim sampah selama masa pandemi?

Jika terpaksa keluar rumah, gunakan masker yang bisa dipakai ulang. Untuk mengurangi tisu basah, bisa membawa sabun dan handuk kecil atau sapu tangan untuk mencuci tangan.

Untuk menjamin hygiene, membawa peralatan makan minum sendiri setiap keluar rumah harusnya lebih masuk akal dibanding mengandalkan peralatan makan minum dari makanan/minuman yang kita beli di luar. Dan kalau pun harus membeli makanan/minuman, bisa gunakan wadah sendiri.

Untuk masak sehari-hari, bisa membeli di tukang sayur keliling dekat rumah. Siapkan wadah untuk bahan basah seperti ikan, daging, dan tahu. Jangan lupa membawa tas belanja. Kalau saya, kebetulan tukang sayur lewat depan rumah. Jadi, saya keluar rumah membawa baskom untuk wadah belanjaan saya.

Apabila terpaksa membeli makanan secara online, pilih pedagang yang tidak mengemas makanan dengan styrofoam dan bisa mengakomodir kemasan minim sampah. Beri pesan agar tidak menggunakan sendok/garpu plastik. Jika di rumah ada sambal botolan, sampaikan juga kita tidak perlu diberikan saus sambal saset.

Seberapa penting upaya mengurangi sampah rumah tangga?

Menurut hasil catatan bersama warga yang menjalani program Rumah Minim Sampah, tercatat bahwa sisa konsumsi yang dihasilkan di rumah, sekitar 50 persennya bisa dikomposkan. Berarti, 50 persen sampah bisa diselesaikan di skala rumah atau lingkungan.

Jika sisa konsumsi yang dapat dikomposkan bisa diselesaikan di skala rumah atau lingkungan, tentu masalah sampah di tingkat kota, beban tumpukan sampah di TPA, dan juga biaya pengelolaan sampah akan berkurang.

Bagaimana strategi mewujudkan rumah

minim sampah?

Tadi sempat saya sebutkan tentang strategi pintu depan, pintu tengah, dan pintu belakang. Apa sih strategi pintu depan? Jadi ini adalah hal-hal yang dilakukan sebelum kita memproduksi atau mengonsumsi sesuatu. Kita memikirkan, merencanakan, menghindari, dan mencari alternatif produk agar sisanya tidak jadi sampah. Contohnya, sebelum belanja kita mencatat apa saja yang dibutuhkan dan membawa wadah yang diperlukan.

Strategi pintu tengah adalah strategi yang dilakukan sebelum kita memproduksi dan mengonsumsi sesuatu. Misalnya, memakai yang ada ketimbang membeli baru, memperbaiki barang rusak ketimbang buru-buru membuangnya. Kita memproduksi dan mengonsumsi secara cermat supaya tidak menghasilkan banyak sampah ataupun sisa.

Nah, strategi pintu belakang adalah strategi setelah kita memproduksi atau mengonsumsi sesuatu, dengan meneruskan sisa produksi atau konsumsi ke siklus berikutnya. Misalnya, apakah sisa tadi masih bisa dikomposkan atau didaur ulang. Yang sudah tidak bisa dikomposkan atau didaur ulang, itulah yang disebut sampah atau residu. Itu yang terpaksa kita kirimkan ke TPA.

Apa saja tips agar kita tetap konsisten menjalankan gaya hidup minim sampah?

Pertama, kita kenali dulu apa motivasi terbesar kita dalam mengurangi sampah. Itu dijaga atau dijadikan penyemangat. Kemudian, kita mulai dari hal yang paling mudah kita lakukan dan paling bisa konsisten kita lakukan. Ketiga, kita bisa ajak keluarga atau komunitas supaya punya teman untuk melakukan ini bersama. Jadi, bisa saling memotivasi bila kita alami kendala atau tantangan. Selain itu, kita jadi memiliki *support system*nya dalam berupaya hidup yang minim sampah.

KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
MADYA SEMARANG

Kompensasi di Tengah Keterbatasan

Teks A. Wirananda

Sejak didirikan pada 2007, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang kini akhirnya memiliki gedung sendiri. Setahun pertama debutnya, kantor ini menggunakan gedung sewaan. Lantas pada 2008, KPP Madya Semarang hijrah ke Gedung Keuangan Negara (GKN). Lokasi kantor inilah yang kemudian mendewasakan KPP Madya Semarang sampai berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK WBBM).

Kompensasi Keterbatasan

Nyono Laksito, Kepala KPP Madya Semarang, menuturkan kisah saat lokasi kantornya berada di GKN. Saat itu, lokasi masing-masing bagian di KPP Madya terletak berjauhan. “Tempat pelayanan itu ada di lantai dua sebelah kanan. Kemudian fungsional, berkas, ada di lantai *basement*. Yang lainnya ada di lantai empat sebelah kiri.” Kondisi seperti ini wajar terjadi karena terdapat lima kantor yang menempati gedung empat lantai itu secara bersamaan. Dengan kondisi semacam itu, Nyono dan tim berupaya mengkompensasi dengan pelayanan yang lebih baik kepada wajib

pajak. Pun, setiap tahun, KPP Madya selalu melakukan survei kepuasan kepada pengguna layanan. Hasil survei itu akan memudahkan Nyono dan tim untuk memetakan perbaikan yang perlu mereka lakukan. Salah satunya dengan memberikan fasilitas pelacakan keberadaan dokumen. Dari pelacak ini, wajib pajak bisa mengetahui status keberadaan dokumennya. Dengan pelacak itu, wajib pajak tidak perlu naik-turun empat lantai tanpa elevator untuk mengetahui perkembangan dokumennya. “Itu sepele tapi bagi mereka (membuat) senang sekali,” tuturnya.

Awalnya Nyono sempat khawatir lokasi antar bagian di kantornya yang berjauhan akan mengurangi kepuasan pengguna layanannya. Namun, alih-alih berlarut dengan kekhawatiran, ia bersama para punggawa KPP Madya Semarang justru mengonversi hal itu dengan ide-ide yang mengkompensasi kenyamanan pengguna layanan. “Jadi ini paling tidak kalau orang Jawa itu ngga ‘njeglek’ gitu ya (bila dibandingkan layanan jasa lain),” ujarnya.

Selain upaya peningkatan di sisi sarana, KPP Madya juga menunjukkan komitmen yang tinggi

Gedung
KPP Madya
SemarangFoto
Dok. KPP
Madya
Semarang



Kepala dan kegiatan KPP Madya Semarang

Foto Dok. KPP Madya Semarang

dalam memberikan pelayanan. Ihwal keluhan, mereka tak pernah main-main menyikapi. Ia bercerita, “Pernah satu kali ada satu masukan yang tidak puas dengan pelayanan kami,” ia melanjutkan, “kita langsung datang kesana gitu, saya tugaskan kepala seksi dan tim untuk datang kesana.” Kendati secara geografis, pengguna yang mengeluh berada di lokasi yang terbilang jauh dari lokasi KPP Madya Semarang.

Keluhan itu datang dari salah satu wajib pajak yang berlokasi di Blora. Dari Semarang, perjalanan ke Blora memerlukan waktu empat sampai lima jam. Wajib pajak yang menyampaikan keluhan itu bahkan tak menyangkan akan mendapatkan respon sedemikian

serius. “Mereka juga kaget, ‘loh ternyata ini serius ya, saya pikir candaan gitu kan,’” ujarnya menirukan.

Nyono juga menambahkan bahwa upayanya memberikan sebaik-baik layanan sangat didukung oleh pengelola GKN, dalam hal ini, Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara (KPTIK BMN) Semarang. “Saya menyampaikan bahwa kami melayani perusahaan yang premium,” ujarnya. Hal itu syahdan disambut dengan upaya KPTIK BMN mendongkrak penampilan gedung kantor yang ditempati KPP Madya Semarang. “Membantu mempercantik juga, tempat terpadu kami, jadi ya relatif lebih menarik gitu,” ujar Nyono.

Memahat Prestasi

Selain kesuksesan menyabet predikat WBK dan WBBM, pada periode awal kepemimpinan Nyono di KPP Madya Semarang, mereka juga berhasil menyabet juara kedua saat menggarap film anti korupsi. Kemudian, tahun ini, KPP Madya Semarang juga mendapatkan prestasi terbaik dalam penagihan pajak secara nasional. Ihwal penagihan, KPP Madya Semarang dikenal cukup baik mengendalikan gas dan rem. “Kalau memang mereka bandel, ya kita effort luar biasa. Kalau mereka kooperatif, kita kasih ruang gitu,” ujar Nyono menjelaskan. Dalam upaya penagihan, KPP Madya Semarang bahkan pernah mencekal warga negara asing saat menunggak pajak.

Sedangkan sebagai upaya mempertahankan lingkungan bersih dari korupsi dan menegakkan pelayanan prima, Nyono dan tim terus menjalin komunikasi dengan para wajib pajak. Nyono mengilustrasikan, “Kita ber kirim kartu lebaran. (Pada) kartu lebaran itu kita kirim awal-awal, terus kita kasih satu note tebal gitu, bahwa kita tidak menerima gratifikasi.” Ia melanjutkan, “karena kan mungkin saja mereka terbiasa memberikan *parcel* gitu kan,” katanya.

Selain kepada wajib pajak, mereka juga terus menjalin hubungan baik kepada sesama pelayan publik. Mereka berbagi pengalaman membangun ekosistem bersih dari korupsi dan berorientasi pelayanan prima. Bahkan, menurut Nyono, KPP Madya Semarang sering dijadikan rujukan studi banding. Selain itu, mereka juga tak jarang diundang untuk berbagi resep bersih-bersih dari korupsi. Tak hanya unit di lingkungan Kementerian Keuangan, undangan itu juga beberapa kali datang dari kementerian dan lembaga di luar Kementerian Keuangan. Ia berharap, di masa mendatang, semakin banyak lagi kantor-kantor pelayanan publik yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM.

Bagaimana Cek Status Barang Kiriman dari Luar Negeri?



1

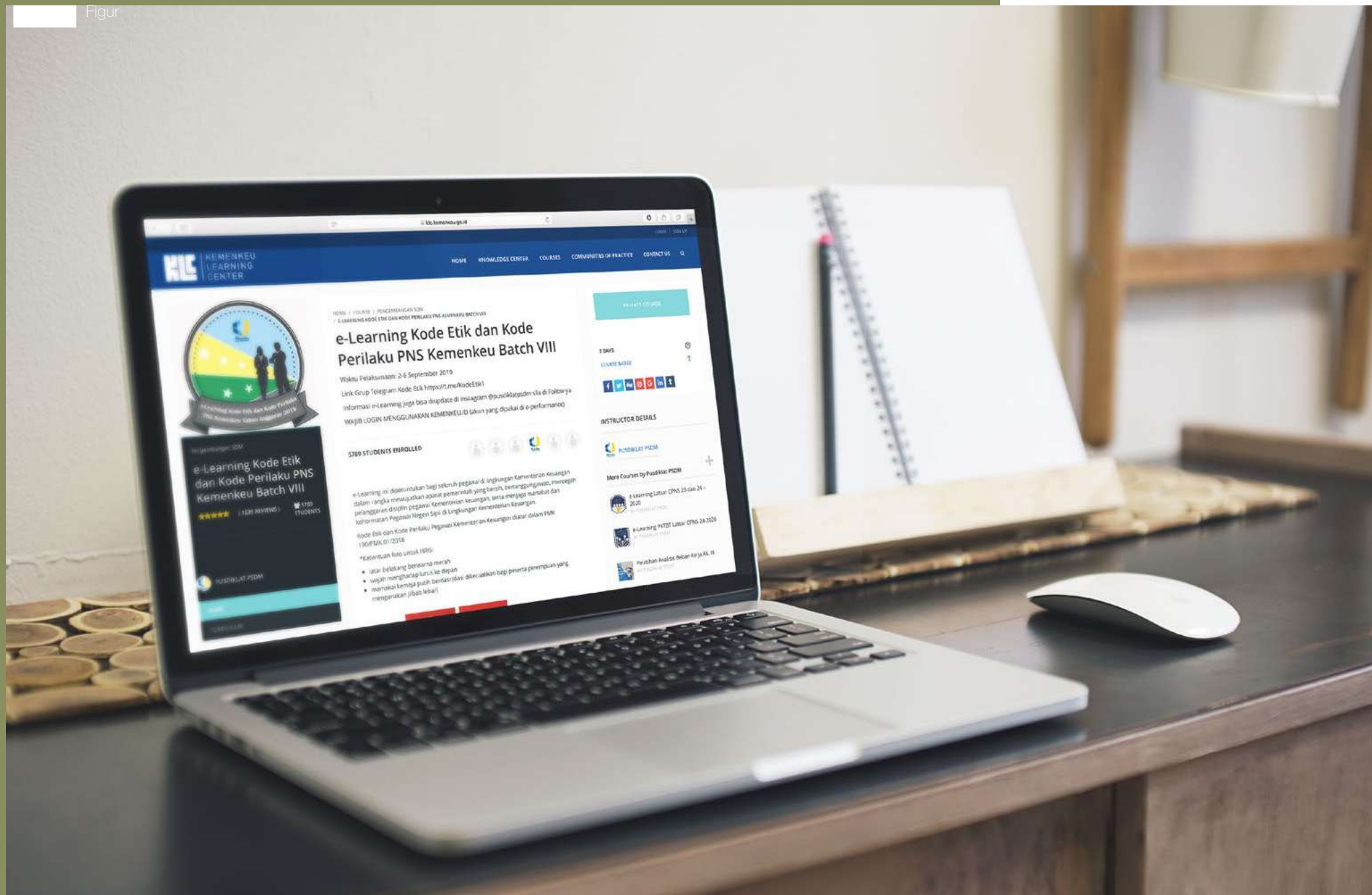
Install aplikasi mobile Beacukai

2

Pilih tracking dan masukkan no. Resi

3

Status kiriman akan tampil



Para Peracik Pembelajaran Menarik

Teks Dimach Putra

Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan serta memperhalus perasaan” – Tan Malaka. Sama seperti ilmu lainnya, pengetahuan mengelola keuangan negara dan institusi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus dipelajari melalui pembelajaran pegawai. Sebagai institusi pembelajar, kemampuan SDM yang makin terasah adalah tujuan institusi yang ingin dicapai.

Kemenkeu adalah institusi publik yang besar. Organisasi ini menaungi 80 ribu lebih pegawai yang tersebar dari ujung ke ujung Indonesia. Sebagai pengelola keuangan negara, bidang keahlian pegawai di Kemenkeu pun beragam. Para punggawa keuangan negara ini memiliki keahlian yang mumpuni sesuai bidang pekerjaan masing-

masing, seperti anggaran, perpajakan, kepabeanaan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara, dan perimbangan keuangan.

Perkembangan zaman yang dinamis menuntut pengembangan keahlian pegawai yang harus selalu diperbarui secara berkala. Selain dalam bidang keahlian teknis khusus, pendidikan dan pelatihan pegawai di luar disiplin ilmu tersebut pun perlu dilakukan. Dari pemikiran tersebut lahirlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Pusdiklat KU BPPK). Unit ini bertugas membina pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanaan dan cukai, kebendaharaam umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPK.

Tuntutan inovasi dalam program pembelajaran menghadirkan proses pembelajaran alternatif tanpa tatap muka langsung di dalam kelas. Perlu orang-orang yang secara berkesinambungan meramu metode pembelajaran dan kurikulumnya. Tujuan utamanya adalah untuk menghadirkan pengalaman belajar baru yang menarik minat para peserta pembelajaran. Di Pusdiklat KU sendiri khususnya, tanggung jawab tersebut diemban oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat (Renbang Diklat).

Meracik diklat yang menarik

Secara konsep, Pusdiklat KU dibentuk untuk melayani lima unit eselon satu di lingkungan Kemenkeu, yaitu Setjen, Itjen, BKF, DJPPR, dan BPPK. Tapi kemudian dalam prakteknya, unit ini juga melayani seluruh Kemenkeu sebagai *prime customer* mereka. ”Ternyata yang diluar itu malah luas lagi karena pekerjaan Kemenkeu yang

sifatnya *holding company* ya, bisa juga disebut begitu,” ungkap Pandu Patriadi Kepala Bidang Renbang Diklat Pusdiklat KU.

Bidang Renbang Diklat secara struktur terbagi menjadi tiga subbidang. Tiap unit membidangi inovasi pembelajaran di bidangnya masing-masing. Subbidang Program melakukan pengumpulan dan analisis data serta perancangan, pengembangan program dan pengkajian diklat. Subbidang Kurikulum bertugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan materi diklat. Subbidang Tenaga Pengajar bertanggungjawab dalam penyiapan tenaga diklat, serta melakukan administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.

Tiga subbidang tersebut bekerja beriringan dari hulu ke hilir menciptakan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan para pegawai Kemenkeu. Bukan suatu hal yang mudah untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti halnya ilmu pengetahuan itu sendiri, proses pembelajaran bergerak dinamis. Tidak *saklek*. Ada seni tersendiri dalam mengolahnya, karena yang dihadapi adalah manusia dengan kapasitas dan pemahamannya masing-masing. Namun yang pasti, Renbang Diklat selalu berorientasi menghasilkan pembelajaran terintegrasi agar proses transfer ilmu dapat dilakukan secara optimal.

Mengubah budaya belajar

Salah satu metode pembelajaran yang sedang digalakkan oleh BPPK beberapa tahun terakhir adalah penerapan *e-learning*. Target tahun lalu sebesar 30 persen berhasil dicapai

menggunakan metode tersebut. BPPK sebenarnya telah mencanangkan target 50 persen di tahun 2020 dan 70 persen di tahun berikutnya. Namun sejak pandemi COVID-19, seluruh pembelajaran praktis dilaksanakan secara digital sejak pertengahan Maret lalu.

Salah satu tantangan dalam *shifting* metode pembelajaran daring adalah mengubah persepsi budaya belajar para peserta diklat. Tidak jauh berbeda dengan metode klasikal, pembelajaran daring tetap ingin menghadirkan pengalaman belajar yang menyeluruh. Di dalam kelas, pengalaman tersebut dihadirkan oleh para widyaiswara atau pengajar. Untuk daring, pengalaman belajar tersebut ditampilkan dengan multimedia interaktif. "Dari sisi budaya belajar, para peserta banyak yang membaca materi selesai kuis, sedangkan kalo multimedia interaktif maksudnya kita kan pengalaman belajar gitu ya," ungkap Nova Mardianti, Kepala Subbidang Program.

Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra. Beberapa berpendapat bahwa penerapan *e-learning* dianggap menyusahkan. Namun menurut Nova, kuncinya tergantung pada kesiapan *mindset* peserta yang belum terbiasa melaksanakan pembelajaran mandiri. Salah satu solusi bagi masalah tersebut adalah dengan memperbanyak *open access* ke pembelajaran daring dalam kemasan *microlearning*. Para pegawai Kemenkeu pun menjadi semakin terbiasa melakukan *e-learning* dengan materi yang lebih mudah dicerna.

Perbaikan internal

Awal peralihan pembelajaran dari klasikal menuju digital tak hanya membuat kalang kabut para peserta. Kesulitan terkait masalah teknis juga sempat dialami oleh para widyaiswara (WI). Pusdiklat Keuangan Umum memiliki 14 WI, yaitu empat WI Utama dan sisanya berada di



Kepala Bidang Renbang Diklat KU beserta.

Foto Dok. Diklat KU dan Biro KLI

level Madya dan Muda. Tiap pengajar membutuhkan proses masing-masing dalam pembiasaan menyampaikan materi seluwes ketika di depan kelas. Bagaimanapun juga, berinteraksi langsung dengan manusia sangat berbeda dengan menghadapi lensa kamera. "Salah satu hal yang kami lakukan adalah melakukan semacam simulasi jadi bagaimana widya iswara ini seolah olah mengajar peserta pelatihan via *online*," ucap Kepala Subbidang Tenaga Pengajar, Shera Betania.

Meski pembelajaran digital telah mengambil alih seluruh porsi penyampaian pembelajaran di era pandemi ini, metode klasikal tak lantas langsung dipunahkan. Pihak Renbang Diklat terus mempelajari efektifitas penyelenggaraan diklat baik secara klasikal maupun non klasikal. Sehingga ke depan, bisa dipetakan lebih detail lagi mana yang bisa dialihkan menjadi *e-learning* mana yang harus tetap klasikal dengan memperhatikan

urgensinya. Tujuannya adalah menghadirkan pembelajaran yang tak hanya semakin menarik, namun juga efektif dan efisien. "Bukan berarti tidak bisa diselenggarakan sama sekali dengan *e-learning*, tapi untuk mencari ramuan yang tepat ini yang susah-susah gampang," beber Agusta Rizar Binadja, Kepala Subbidang Kurikulum.

Terakhir, saat ditanya tentang program pembelajaran yang ideal, Pandu, Kabid Renbang Diklat KU, berpendapat bahwa program tersebut harus menjawab kebutuhan dan meningkatkan kinerja pengguna. Gambaran pembelajaran yang ideal semudah mendapatkan solusi melalui konten pembelajaran bebas di internet, namun dalam lingkup Kemenkeu. "Idealnya budaya belajar tersebut semudah mencari solusi melalui konten pembelajaran di KLC sebagai satu-satunya platform *learning and knowledge management system*," pungkasnya.

Asthenopia

KONDISI MATA LELAH YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS KERJA

Teks dr Nur Zahratul Jannah Foto Anas Nur Huda

Di masa pandemi ini, aktivitas bekerja nyaris tak pernah lepas dari gawai. Kebijakan bekerja dari rumah atau *work from home* (WFH), semakin menuntut kita menatap layar komputer lebih lama untuk menggantikan aktivitas tatap muka secara langsung, misalnya kegiatan *online meeting*. Akibatnya, beban kerja mata semakin meningkat dan berujung pada asthenopia.

Asthenopia adalah gejala-gejala yang timbul akibat kelelahan pada mata. Biasanya, gejala tersebut disebabkan oleh aktivitas melihat dalam jarak dekat yang membutuhkan konsentrasi tinggi dan dalam jangka waktu yang lama. Mata yang lelah umumnya akan membaik ketika kita istirahat. Namun, kelelahan terus menerus pada mata, dapat menimbulkan gejala seperti mata berair dan pandangan kabur, nyeri pada sekitar mata, dan jika terlalu lama

menatap layar tanpa berkedip, mata akan kering, merah, dan gatal.

Tidak hanya itu, kelelahan pada otot mata, dapat menimbulkan sakit kepala, nyeri daerah leher, pundak, punggung, bahkan memicu migrain dan mual. Pengidap asthenopia juga lebih sensitif saat melihat cahaya. Kondisi tersebut tentunya berdampak terhadap produktivitas dan performa dalam bekerja. Akibatnya, kita tidak bisa efisien dan nyaman saat melakukan pekerjaan.

Saat ini, mengurangi penggunaan ponsel pintar dan komputer sulit dilakukan karena tuntutan pekerjaan. Namun, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir risiko asthenopia. Pertama, lakukan *20-20-20 rules*, yaitu setiap kita melihat layar selama 20 menit, pastikan untuk mengistirahatkan mata dengan cara menatap objek yang berada pada jarak 20 *feets* (sekitar 6 meter) selama 20 detik. Kedua, usahakan sering mengedipkan kelopak mata agar permukaan mata tidak kering.

Normalnya, manusia berkedip 15 kali permenit, dan saat konsentrasi menatap layar, kita sering kali hanya berkedip 7-8 kali saja.

Ketiga, gunakan pencahayaan yang sesuai. Intensitas pencahayaan yang berlebihan maupun kurang akan menambah beban kerja mata. Sesuaikan *brightness* pada layar gadget agar sama terang dengan pencahayaan di ruangan. Selain itu, gunakan ukuran *font* yang lebih besar pada layar komputer anda. Hal yang tidak kalah penting, posisikan badan secara ergonomis dengan meja kerja yang nyaman. Atur jarak minimal 25 inch dari layar dan posisikan layar sehingga mata menatap layar ke bawah, bukan lurus ke depan atau ke atas.

Asthenopia merupakan gangguan penglihatan yang sering ditemui serta berdampak kualitas pekerjaan kita. Oleh karena itu, kondisi ini memerlukan perhatian, sehingga kita dapat bekerja dengan kemampuan terbaik tanpa terganggu rasa sakit dan terhindar dari ketidaknyamanan.

MENGATASI KESALAHPAHAMAN

Kebijakan New Normal yang Dipilih Pemerintah

Teks Rahma Aziza Fitriana, pegawai Balai Diklat Keuangan Denpasar

Kebijakan *new normal* yang dipilih pemerintah menuai pro kontra. Banyak pihak beranggapan bahwa kebijakan ini diambil terlalu dini mengingat jumlah kasus penderita virus COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan penurunan. Masyarakat beranggapan bahwa kebijakan *new normal* tidak berpihak pada keselamatan masyarakat. Lantas, benarkah hal tersebut?

Dalam penulisan opini ini, penulis membagikan kuisioner sebagai penilitan awal kepada 40 responden. Responden tersebut merupakan WNI yang tersebar di berbagai daerah. Sebanyak 57,5% responden berusia 18-25 tahun dan sisanya diatas 25 tahun. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 77,5% responden beranggapan kebijakan *new normal* yang dilakukan pemerintah lebih berpihak pada aspek ekonomi ketimbang keselamatan jiwa. Hasil ini sesuai dengan isu yang beredar di masyarakat bahwasanya pemerintah lebih mementingkan sisi ekonomi yang mengalami krisis akibat pandemi

ketimbang keselamatan masyarakat.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi sebelum COVID-19 berada di angka 5,3%. Akan tetapi, setelah terjadi pandemi, proyeksi itu ada di angka 2,3% untuk skenario berat dan -0,4% untuk skenario sangat berat. Pertumbuhan ekonomi yang turun drastis menjadi penyebab pemutusan hubungan kerja besar-besaran dan meningkatnya jumlah pengangguran. Akibatnya, jumlah masyarakat miskin semakin bertambah.

Potensi dampak sosial yang terjadi akibat COVID-19 menunjukkan angka yang fantastis. Diperkirakan jumlah kemiskinan akan bertambah sebesar 1,89 juta orang pada skenario berat dan 4,86 juta orang pada skenario sangat berat. Jumlah penganguran pun akan naik sebesar 2,92 juta orang pada skenario berat dan 5,23 juta orang pada skenario sangat berat.

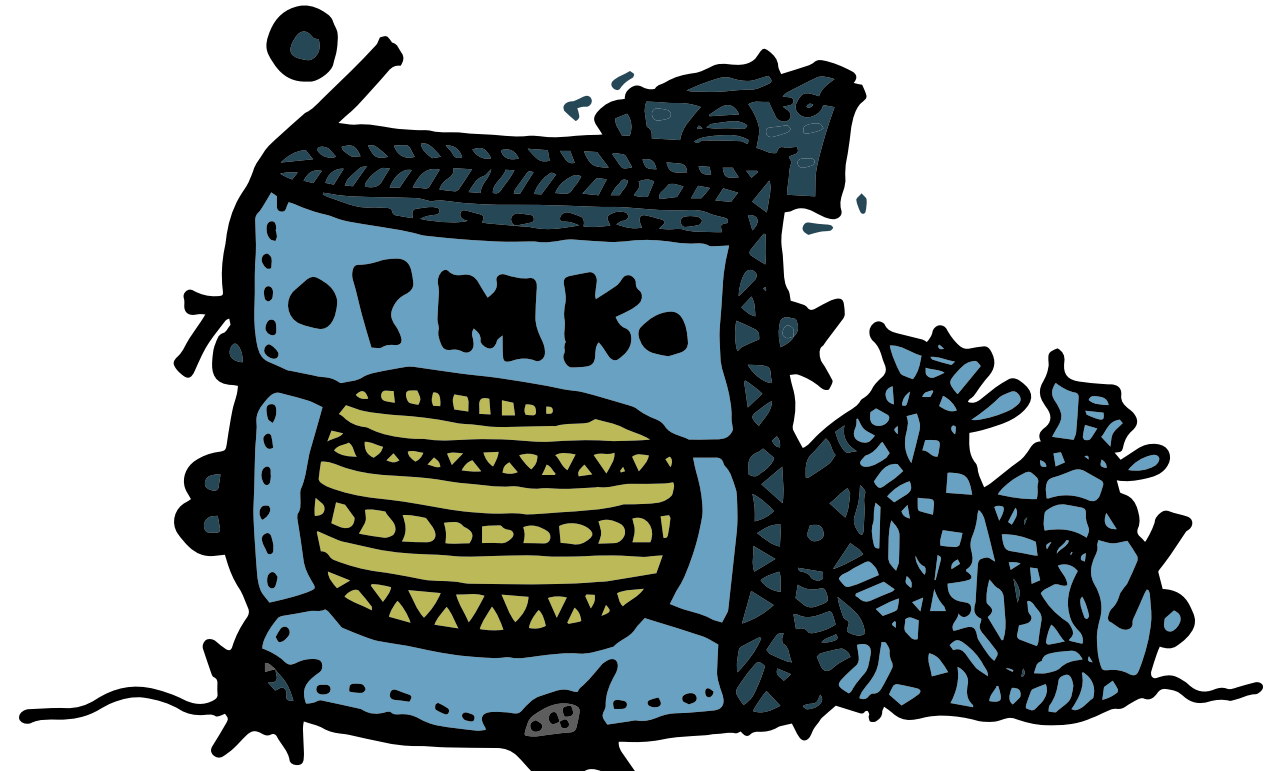
Pemerintah selaku pembuat kebijakan melakukan langkah *extraordinary* untuk menangani pandemi ini. Dana sebesar Rp 695,2 triliun yang dilokasikan untuk mengatasi COVID-19 adalah bukti

keseriusan pemerintah. Dana tersebut didistribusikan melalui kebijakan kesehatan, *social safety net*, dukungan industri, dan Program Pemulihan Ekonomi (PEN).

Kita telah melihat berbagai upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi ini baik dari segi kesehatan maupun dari segi perekonomian. Akan tetapi, apakah data-data terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi, kenaikan jumlah pengangguran dan kemiskinan, serta dana yang dikeluarkan pemerintah untuk berbagai aspek sampai ke masyarakat?

Sebanyak 62,5% responden tidak mengetahui jumlah kenaikan angka pengangguran dan kemiskinan yang terjadi akibat COVID-19. Artinya, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui berapa angka pasti kenaikan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui berapa jumlah orang miskin baru yang timbul akibat pandemi ini. Hal tersebut mendorong terjadinya penyepelean masalah ekonomi dalam benak masyarakat.

Ilustrasi
A. Wirananda



Sebanyak 72,5% responden tidak mengetahui nominal yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19. Ketidaktahuan masyarakat mendorong terjadinya asumsi bahwa pemerintah tidak serius dalam menangani masalah ini. Padahal, jika kita cermati data-data di atas, pemerintah telah mengeluarkan nominal yang tidak sedikit untuk berbagai aspek.

Timbul pertanyaan, mengapa data-data di atas tidak sampai ke masyarakat? Apakah pemerintah tidak mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang dilakukan selama pandemi? Sebanyak 80% responden beranggapan bahwa pemerintah tidak memberikan informasi yang jelas terkait kebijakan-kebijakan yang dilakukan selama pandemi. Padahal, apabila kita cermati bersama, pemerintah telah menginformasikan kebijakan-kebijakan yang dilakukan melalui berbagai media, utamanya media sosial instagram.

Melalui akun media sosial @kemenkeuri, pemerintah telah membuka data-data di atas. Mulai dari proyeksi pertumbuhan ekonomi, jumlah kenaikan pengangguran dan kemiskinan, belanja dan pendapatan negara, sampai program-program yang pemerintah canangkan untuk mengatasi pandemi ini.

Kebijakan *new normal* yang dipilih pemerintah pun tidak serta merta membebaskan kegiatan masyarakat secara keseluruhan. Ada tahapan atau fase-fase yang disesuaikan dengan tingkat kesiapan dalam mematuhi syarat yang dikedepankan. Evaluasi terhadap pelaksanaan *new normal* pada setiap fase juga dilakukan. Hal ini merupakan bukti bahwa pemerintah mengutamakan aspek keselamatan jiwa dan aspek ekonomi secara berdampingan.

Tidak bisa dipungkiri, ada pelonjakan jumlah kasus COVID-19 saat pemerintah melakukan kebijakan

new normal di sebagian daerah. Hal ini menjadi masukan bagi pemerintah agar secara aktif melibatkan masyarakat untuk mengutamakan aspek keselamatan jiwa dan ekonomi secara berdampingan. Pemerintah diharapkan tidak bosan memberikan informasi keadaan *real* yang terjadi agar masyarakat teredukasi dengan baik.

Demikian halnya masyarakat diharapkan dapat berinisiatif mencari data dan fakta yang telah dibuka oleh pemerintah guna mengetahui keadaan *real* yang tengah dihadapi negara ini. Masyarakat juga diharapkan dapat menyaring informasi dengan baik sehingga mampu mengambil kesimpulan secara bijak.

*Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan/perspektif institusi tempat penulis bekerja.

Jembatan Persatuan dan Kebersamaan

Foto dan Teks Resha Aditya Pratama

Jembatan Merah Putih Ambon merupakan jembatan terpanjang di Indonesia bagian timur yang membentang diatas teluk dalam Pulau Ambon dan menghubungkan Desa Rumah Tiga (Poka) di Kecamatan Sirimau pada sisi utara ke Desa Hative Kecil/Galala di Kecamatan Teluk Ambon pada sisi selatan. Jembatan sepanjang 1.140 meter ini dibangun dengan APBN senilai Rp779,2 miliar dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 April 2016. Dengan adanya jembatan ini, jarak dan waktu tempuh dari Kota Ambon menuju Bandara Pattimura dan sebaliknya menjadi lebih singkat, sehingga biaya operasional transportasi dapat berkurang. Waktu tempuh dari Bandara Pattimura menuju ke tengah Kota Ambon yang sebelumnya memakan waktu 1 jam hanya menjadi 10-15 menit saja. Kini Jembatan Merah Putih telah menjadi urat nadi penghubung yang vital di Kota Ambon. Jarak akan makin pendek, ekonomi akan makin maju, pariwisata juga jadi diuntungkan. Bagi warga Ambon Jembatan Merah Putih ini menjadi lambang persatuan dan kebersamaan. Jembatan ini menjadi penyambung antara dua bagian yang semula terpisah, kini tersambung menjadi satu.

Panjang Jembatan

1.140 m

Total APBN

Rp779,2 m

Waktu Peresmian

04.04.16

FENOMENA *RACE TO THE BOTTOM* DALAM

Pajak Internasional

Teks M. Rifqy Nurfauzan Abdillah dan Pungki Yunita Chandrasari,
pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal*

Pada abad ke-21, negara-negara berlomba-lomba untuk menurunkan tarif pajak dan menawarkan insentif pajak dalam rangka menarik arus investasi global. Globalisasi dan perdagangan bebas menuntut adanya pergerakan bebas (*free movement*) faktor-faktor produksi, salah satunya adalah modal. Untuk mendapatkan modal, negara menawarkan insentif dalam bentuk pemotongan tarif PPh Badan, insentif pajak, atau deregulasi perpajakan. Hal ini mengakibatkan persaingan pajak antarnegara terjadi. Tingginya angka pengganda dari *shock* yang ditimbulkan dari investasi menyebabkan persaingan perebutan investasi asing atau *foreign direct investment* (FDI) menjadi sengit. Sebagai konsekuensi dari kompetisi, fenomena “*race to the bottom*” dalam hal penurunan tarif dan obral insentif pajak seringkali tidak dapat dihindari dan mengganggu sistem pajak negara-negara di dunia.

Di sisi lain, Indonesia baru-baru ini bergabung dengan tren yang ada untuk menyesuaikan tarif PPh yang berlaku yaitu sebesar 22 persen untuk tahun 2020 dan 2021 serta akan turun menjadi

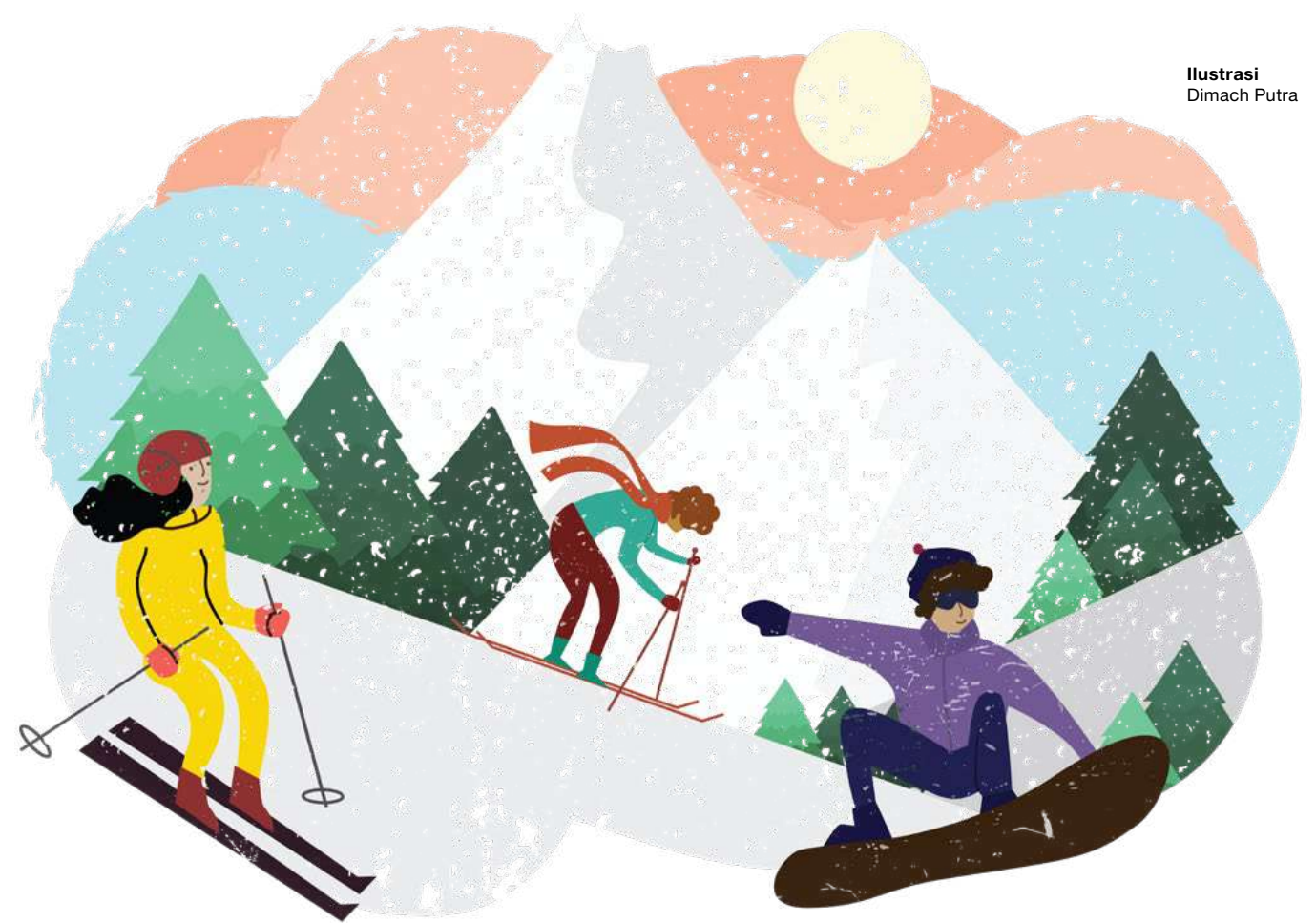
20 persen mulai tahun 2022. Selain itu, ada tambahan pengurangan 3 persen lebih rendah dari tarif yang disebutkan di atas, terutama untuk perusahaan publik dengan 40 persen total sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu.

Terkait insentif pajak, Indonesia baru saja merilis fasilitas pajak baru dalam bentuk *tax allowance* sebagai pelengkap kebijakan *tax holiday* yang masih berlaku. Filipina sebagai negara yang mengenakan tarif PPh Badan tertinggi di ASEAN juga mencoba menawarkan skema insentif pajak baru bersama dengan pengurangan tarif PPh badan dalam rancangan undang-undang baru mereka. Dari tren ini, kita memiliki dua pertanyaan yang perlu dijawab. Pertama, apakah tidak masalah bagi Indonesia untuk mengikuti *race* ini dan yang kedua apakah Indonesia memiliki semua kualitas pajak yang diperlukan untuk menarik investasi.

IMF sendiri sudah memberitahukan bahwa persaingan pajak di antara negara-negara ASEAN dapat merusak penerimaan negara. Persaingan pajak akan menguntungkan investor sementara kebutuhan untuk mendanai belanja publik semakin besar. Jadi,

apakah keputusan Indonesia untuk menurunkan tarif dalam rangka meningkatkan investasi salah? Jawaban sederhananya tidak, karena itulah yang diperlukan untuk menggaet FDI. Secara global, FDI telah secara signifikan terbukti meningkatkan kontribusi PDB dari 8 persen di tahun 1990 menjadi 31 persen di tahun 2009.

Dalam hal persaingan pajak, inisiatif pajak global diperlukan untuk memastikan adanya sebuah *level playing field*. OECD telah menetapkan standar internasional tentang transparansi pajak yang mengarah pada penerapan informasi pertukaran untuk tujuan pajak guna memerangi penggelapan pajak. Sementara masalah celah diselesaikan, hal tersebut tidak menghentikan negara-negara untuk memberikan insentif dan mengurangi tarif pajak mereka. *Forum on Harmful Tax Practice* OECD telah menilai rezim pajak preferensial dari negara-negara yang menyediakan banyak fasilitas pajak. Hal ini mengarah ke adanya basis pajak yang rendah, yang cenderung ke persaingan pajak yang tidak sehat. Harmonisasi kebijakan perpajakan diperlukan untuk mencegah adanya rezim tersebut meskipun pada dasarnya suatu negara tidak



bisa melarang kebijakan perpajakan negara lain karena itu merupakan suatu kedaulatan.

Sejatinya persaingan pajak tidak hanya diidentifikasi dari tarif pajak, tetapi juga perlu melihat sistem perpajakan dan administrasi pajak suatu negara. Sebagian besar negara di ASEAN mengadopsi *worldwide income*, kecuali Malaysia dan Singapura yang menggunakan sistem *territorial income*. Didukung dengan tarif PPh badan yang rendah, pernyataan OECD menegaskan bahwa penggunaan sistem pajak teritorial merupakan salah satu indikasi kebijakan pajak yang *hamful* bagi rezim pajak preferensial. Di sisi lain, *paying taxes* di Singapura menduduki peringkat terbaik di kawasan ASEAN. Singapura jauh lebih unggul dalam administrasi urusan perpajakan dengan hanya membutuhkan 82 jam setahun sedangkan di Indonesia membutuhkan 259 jam setahun untuk memenuhi

kewajiban pajak berdasarkan laporan yang dirilis oleh PwC dalam *Paying Taxes* 2014.

Terlepas dari faktor non-pajak, faktor pajak memang memainkan peranan penting sebagai salah satu faktor investasi. MENA-OECD mendefinisikan faktor-faktor pajak yang mempengaruhi FDI sebagai tarif pajak, insentif pajak dan administrasi pajak. Salah satu kriteria administrasi pajak yang ideal adalah kepastian. Setiap investor menginginkan tingkat kepastian tertentu untuk pengembalian investasi mereka. Oleh karena itu, ketidakstabilan dan ketidakpastian dalam penerapan undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan dapat menghambat tujuan tersebut. Otoritas pajak dapat meningkatkan kepastian dengan memperbaiki hal-hal tertentu, seperti memastikan pemahaman yang sama antara wajib pajak dan pemeriksa tentang penerapan suatu peraturan

dan meningkatkan kualitas mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

Langkah Indonesia dalam hal tarif dan insentif pajak sudah cukup memadai. Pada tahun 2022, tarif PPh Badan Indonesia akan bisa bersaing dengan Singapura. Indonesia juga sepenuhnya mematuhi standar internasional, dengan rezim yang lebih *fair* dan sehat tidak seperti Singapura. *Race to the bottom* adalah fenomena yang tidak terelakkan di dunia perpajakan saat ini, termasuk bagi Indonesia. Apabila ditambah dengan upaya untuk meningkatkan standar administrasi pajak yang ada saat ini, Indonesia bisa berpotensi menempati posisi teratas sebagai negara tujuan investasi.

*Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan/perspektif institusi tempat penulis bekerja.

Politik di Tangan Milenial

Teks CS. Purwowidhu

Perubahan zaman tak terelakkan. Ada yang berganti, pun ada yang bertahan dalam lintasannya. Namun yang pasti, kepercayaan harus diperjuangkan. Demikian sekelumit ungkapan dari Chairil Anwar, penyair terkemuka Indonesia angkatan '45. Mengemban amanah, terlebih dari rakyat bukanlah perkara enteng. Hal ini utamanya dirasakan oleh para wakil rakyat di parlemen. Tak jarang karena ulah segelintir oknum yang mencederai kepercayaan rakyat, stigma terhadap anggota legislatif pun menjadi negatif. Ranah perpolitikan akhirnya tak ayal dicap jahat atau kejam sehingga acapkali kurang diminati sebagai ladang kontribusi diri, khususnya oleh para milenial.

Berbeda dari kaum milenial pada umumnya, alih-alih berkarya di bidang lain, Dyah Roro Esti memantapkan jejak untuk terjun ke dunia politik. Melalui fraksi Golkar, ia menebarkan kiprahnya sebagai anggota DPR RI mewakili daerah pemilihan (dapil) Lamongan–Gresik, Jawa Timur. Dibesarkan dalam keluarga yang mafhum berpolitik, dara kelahiran 26 tahun silam ini mengaku banyak belajar dan terisnpirasi dari sosok sang Ayah yang telah puluhan tahun makan asam garam di dunia politik Indonesia. “Sedari kecil, Ayah sering mengajak kami anak-anaknya ke dapil di Tuban–Bojonegoro untuk berkomunikasi dengan masyarakat,” kenangnya. Meski awalnya terbersit rasa takut untuk bergabung dalam perpolitikan, sulung dari dua bersaudara ini akhirnya memberanikan

diri untuk maju sebagai calon legislatif pada pemilu tahun 2019 silam.

Sosok pembelajar

Masuk dalam kategori 10 persen anggota DPR berusia muda pada periode 2019–2024, tak mudah awalnya bagi Esti untuk beradaptasi dengan lingkungan yang mayoritas diisi oleh kolega yang lebih senior dan berusia jauh di atasnya. Namun kondisi tersebut tak membuatnya tawar hati melainkan ia memanfaatkan kesempatan yang ada untuk belajar dari pengalaman para seniornya. Seiring berjalannya waktu, pribadi yang berpandangan terbuka dan tak pernah malu bertanya itu pun dapat menyetarakan diri dengan para koleganya melalui kompetensi, kapabilitas, dan kepedulian yang ditunjukkannya terhadap isu-isu yang dibahas di DPR. “Lama kelamaan senior itu tidak lagi melihat kita sebagai anak kecil, tetapi sebagai kolega yang bisa diajak berdiskusi mengenai cara membangun negara agar lebih baik lagi ke depannya,” ungkapny.

Sosok pembelajar ini juga punya perspektif tersendiri dalam menghadapi beragam dinamika kerja sebagai wakil rakyat di DPR. “Saya memandang institusi DPR seperti universitas dengan banyak fakultas. Every day is a learning experience. Setiap komisi punya ranah yang berbeda dan tiap hari kita dipaparkan materi data maupun program pemerintah dan para mitra kerja. Namun perbedaannya, sekarang saya dalam posisi untuk mewakili masyarakat dalam menjalankan tiga fungsi DPR yakni anggaran, legislasi dan

pengawasan,” ucap anggota Komisi VII DPR tersebut.

Menjaga amanah

Masa reses DPR selalu dinantikan Esti karena saat itu ia bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat di dapilnya. “Dengan turun ke lapangan, saya selalu merasa dekat dengan masyarakat. Mendengar cerita mereka menjadi penyemangat saya ketika berjuang di DPR,” ujarnya. Tak pelak, adanya pembatasan akibat COVID-19 membawa kesedihan tersendiri bagi Esti dan kehilangan luar biasa akan momen kebersamaan dengan masyarakat. Namun kondisi ini tidak menyurutkan semangatnya. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, beberapa waktu lalu Esti meninjau beberapa lokasi program sumur bor dalam untuk masyarakat Lamongan yang diperjuangkannya di Komisi VII melalui Kementerian ESDM. Sumur bor tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 2000 jiwa akan air bersih terutama pada musim kemarau.

Esti selalu berfokus agar dirinya dapat membawa banyak manfaat, baik bagi masyarakat di dapilnya maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Baginya, sebuah jabatan atau profesi apapun yang ditekuni merupakan titipan dari Yang Maha Kuasa. Ia merasa keberadaannya di dunia politik melalui kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat merupakan sebuah panggilan yang harus dijalankan seoptimal mungkin untuk kebaikan rakyat.

Politik itu, Esti menuturkan, bagus



Dyah Roro Esti, Anggota DPR RI/ Awardee LPDP

Foto Dok. Pribadi

atau tidaknya tergantung dari orang yang menjalaninya. Begitupun dengan amanah. Apabila seseorang sudah sedari awal memiliki tekad dan niat baik untuk membangun bangsa maka itulah yang selanjutnya akan ditekuni dan dikerjakan ketika ia meraih sebuah jabatan. “Tetapi kalau dari awal memang niat kita itu udah jelek, ya ke depannya kita akan *we are putting danger in our own life* ibaratnya begitu,” pungkasnya.

Hati untuk Indonesia

Pernah mengecap hidup di luar negeri selama hampir 14 belas tahun lamanya, tidak memadamkan kecintaan Esti pada tanah kelahirannya. Berlatar pendidikan S1 di bidang sosiologi ekonomi dari University of Manchester serta S2 di bidang *environmental technology*, peraih gelar master dari Imperial College London dengan pendanaan beasiswa LPDP tersebut sejak lama memupuk *passion* untuk dapat berkontribusi bagi masa depan berkelanjutan untuk Indonesia.

Program Persiapan Keberangkatan (PK) LPDP menjadi titik balik Esti dalam

membulatkan tekadnya tuk lebih berkarya bagi negeri. Pada program tersebut, ia dipertemukan dengan *awardee* LPDP lainnya yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka saling belajar dan bertukar pengalaman. Perempuan yang dibesarkan di lima negara dan tujuh kota ini pun makin termotivasi dan panggilan jiwanya semakin kuat. “Apapun yang saya lakukan, itu harus untuk Indonesia, bagaimanapun caranya,” tuturnya mengenang momen itu. Menurut Esti, beasiswa LPDP merupakan wujud nyata negara dalam menciptakan generasi emas menyongsong 2045. Ia bersyukur dan bangga menjadi bagian dari upaya tersebut.

Impian Esti untuk berkontribusi bagi orang banyak mulai diwujudkan sepulangnya dari mengenyam studi S2 di Inggris. Pada pertengahan 2016, Esti bersama adiknya, Satya Hangga Yudha yang juga *awardee* LPDP, mendirikan Yayasan Indonesian Energy and Environmental Institute (IE21), sebuah NGO yang bergerak dalam penanganan krisis lingkungan akibat pemanasan global dan perubahan iklim.

Agar Indonesia berkelanjutan

Dalam berbagai kesempatan baik di DPR maupun dalam wadah kerja sama antar parlemen dan organisasi internasional, Esti senantiasa mengadvokasikan implementasi percepatan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Salah satu terobosan yang dicapai oleh Komisi VII yang membidangi energi, riset teknologi, dan lingkungan yakni masuknya RUU mengenai energi baru dan terbarukan ke dalam prolegnas tahun 2020. “Berdasarkan Undang-undang Nomor 16/2016 Indonesia sudah berkomitmen untuk mengurangi gas rumah kaca sebesar 29 persen, dan 41 persen dengan bantuan internasional,” ujarnya. Salah satu sektor yang berkontribusi terhadap gas rumah kaca adalah sektor energi. Oleh karena itu, dengan kita mendorong energi baru terbarukan, Esti memaparkan, harapan besarnya bisa mengurangi gas rumah kaca dan membawa Indonesia ke era transisi energi.

Di samping bidang energi, Esti berpendapat pengelolaan limbah juga penting diperhatikan untuk keberlanjutan lingkungan yang sehat di Indonesia. “Kita harus memperbaiki sistem pengelolaan sampah, khususnya limbah B3 semasa COVID-19 ini demi Indonesia yang sehat,” pungkasnya.

Esti berpesan agar anak muda Indonesia selalu menjadi orang yang proaktif dan tidak takut bertanya. Ia juga mengajak generasi muda untuk introspeksi diri dan bertanya kontribusi apa yang ingin dilakukan bagi Indonesia. “Setiap orang mempunyai peran dalam membangun sebuah bangsa. Perjalanan saya belum tentu sama dengan perjalanan teman-teman yang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dan kerja sama,” ucap sosok yang mengidolakan BJ. Habibie dan Barrack Obama tersebut. Tak lupa ia mengingatkan untuk selalu bertekun menjalani proses yang ada. “Jangan putus asa walaupun kita belum berhasil. Percaya diri saja dan teruslah berjuang untuk insya Allah mencapai apa yang kita inginkan,” tandasnya.

MENDAKI SANTAI KE

RANU KUMBOLO

Teks dan Foto Sanda Aditya Arisandi

Berpergian ala anak muda identik dengan wisata irit ala backpacker. Kenyamanan nomor dua, yang penting pengalaman. Tapi jika ada kesempatan, semua pasti ingin merasakan kenyamanan saat berpergian. Apalagi kalau cuma-cuma.

Ajakan itu datang dari seorang atasan di kantor. Suatu ketika kami harus bertugas ke Surabaya sampai hari Jumat. Sekalian berakhir pekan, ia memutuskan menunda kepulangan untuk mendaki ke Ranu Kumbolo. Beliau mengajak kami yang beberapa diantaranya sudah berpengalaman mendaki gunung. Kalau biasanya saat traveling aku sibuk mencatat biaya yang dikeluarkan, perjalanan ini bagiku penuh dengan senyum. Atasanku berjanji menanggung semua ongkos dari dompet pribadinya dan memilih moda transportasi ternyaman untuk kami semua.

Perjalanan dimulai pada Kamis tengah malam. Kami memesan taksi dari hotel ke terminal Bungurasih. Dari Bungurasih, kami naik bus tujuan terminal Arjosari Malang. Bus trayek Jawa Timur memang terkenal menyeramkan karena ugal-ugalan. Rupanya rasa seram itu akan bertambah saat Anda memilih bus malam. Kami berencana tidur sepanjang perjalanan agar badan segar saat mendaki esok paginya. Kenyataannya, kami terombang-ambing di atas kursi masing-masing sambil merapal doa-doa keselamatan.

Transit di Ranu Pani

Setibanya di Malang, kami naik angkot ke Tumpang dan berhenti sejenak di sana untuk sarapan dan membeli beberapa sayur dan bumbu dapur di pasar. Kami melanjutkan perjalanan ke Ranu Pani dengan menyewa jeep yang hanya diisi 5 orang. Aku teringat saat *backpacking* sebelumnya yang harus berdesak-desakan menumpang bak truk di tengah hujan bersama lebih dari 30-an pendaki lainnya.

Karena menyewa jeep pribadi, kami bisa leluasa berhenti di tempat-tempat ikonik seperti dalam adegan film "5 Cm" untuk sekedar berfoto. Sesampainya di Ranu Pani, kami segera mengurus izin (simaksi) yang telah kami persiapkan sebelumnya melalui laman resmi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Di pos lapor, kami mendengarkan prosedur keselamatan dan ceramah singkat petugas balai.

Tim pendaki yang unik

Pendakian pun dimulai. Tak semua anggota rombongan kami memiliki pengalaman mendaki sebelumnya. Selain aku, ada seorang yang pernah mendaki dan punya pengalaman hampir hilang di Gunung Ciremai. Lalu tentu saja ada atasanku yang dermawan namun selalu meminta istirahat setiap sepuluh menit. Satu temanku yang suka fotografi mendapat tugas sebagai juru dokumentasi. Terakhir, seorang teman yang tidak punya pengalaman mendaki sama sekali. Ia baru mau ikut setelah dibujuk sekian lama. Ia bahkan sudah mengeluh pundaknya sakit saat sebelum masuk gerbang pendakian.

Teman kami ini tak lupa bertanya setiap beberapa kilometer pendakian, "Masih jauh, Bro? Udah mau sampai kan?". Alih-alih menjawab, aku terus mengingatkan untuk tidak fokus pada kadar oksigen yang tipis dan beratnya perjalanan. Kami terus menyemangati dan memintanya untuk menikmati jalur

pendakian salah satu gunung terindah tanah air ini. Untungnya ada atasan kami, sebagai yang paling senior beliau selalu menengahi dengan caranya. Sesekali kami beristirahat sambil *nyemil* semangka yang dibelinya dari penjaja yang menawarkan. Kami baru melanjutkan perjalanan kalau sudah kedinginan karena kelamaan duduk.

Singkat cerita, kami baru tiba di Ranu Kumbolo saat hari sudah gelap. Tak ideal memang. Kami menempuh pendakian selama delapan jam. Normalnya, pendakian ke Ranu Kumbolo ditempuh dalam 5-6 jam. Keempat teman saya langsung menggigil kedinginan dan langsung meringkuk di balik *sleeping bag*.

Pagi indah berselimut kabut

Pagi harinya, mereka bangun dan langsung kegirangan. Mereka tak hentinya berfoto di sana-sini dengan berbagai pose. Ranu Kumbolo, seperti biasa, memang selalu indah. Menurutku, semua tempat di Semeru spesial tetapi magnetnya tetap ada di Ranu Kumbolo, Tanjakan Cinta, dan Sabana Oro-Oro Ombo yang saling berdekatan. Kami semua telah melupakan saat-saat susah penuh keluh-kesah sepanjang perjalanan kemarin. Setelah sarapan, kami berkemas dan kembali turun pada pukul 9 pagi.

Rupanya, perjalanan turun harus dimulai dengan menaiki punggung bukit yang mengelilingi danau terlebih dulu. Lagi-lagi kami istirahat setiap beberapa menit dan setiap bertemu penjual semangka potong. Kalau dihitung sepertinya perjalanan turun kami tidak lebih cepat dibanding perjalanan naiknya. Tak apalah, namanya juga jalan-jalan santai. Sebuah pengalaman yang unik dan tak akan terlupakan.

Artikel dalam rubrik ini terbuka untuk umum. Kirimkan naskahmu ke alamat email mediakeuangan@kemenkeu.go.id sertakan nama, alamat, dan no telepon.

UANG DAN PERTEMANAN

Teks Resha Aditya P. | Foto Biro KLI

Beberapa waktu lalu, beredar video lucu di salah satu postingan akun ternama di Indonesia. Video tersebut berupa parodi dari cerita teman-temannya yang menghindari ketika ditagih untuk membayar utang. Kondisi semacam ini rupanya sering terjadi dan bisa merusak hubungan pertemanan. Kali ini kita akan membahas apa yang harus dilakukan jika Anda menjadi pihak kreditur maupun debitur.

Jika Anda menjadi pihak yang memberi utang atau sebagai kreditur, perlu diingat bahwa memberikan pinjaman uang kepada teman atau saudara merupakan salah satu hal yang sangat tidak dianjurkan dalam konsep perencanaan keuangan. Selain memiliki potensi gagal bayar yang besar, persoalan ini juga bisa berdampak pada rusaknya hubungan pertemanan atau kekeluargaan jika terjadi gagal bayar. Lalu, sikap apa yang harus diambil jika tiba-tiba ada teman atau saudara kita meminjam uang?

Pertama, katakan 'tidak' dengan

cara yang tepat. Terutama jika tujuan meminjam adalah untuk kebutuhan konsumtif. Tunjukkan sikap bahwa Anda tidak menyetujui hal ini sebagai prinsip hidup Anda. Kedua, tawarkan solusi dengan meminjam ke institusi keuangan secara legal. Terakhir, jika Anda terpaksa memberikan pinjaman dalam jumlah besar, pastikan Anda memiliki jaminan atas transaksi tersebut. Semua proses pinjam meminjam dengan nominal diatas Rp50,000,000 sebaiknya dibuatkan perjanjian legal di hadapan notaris. Tidak peduli sebaik apapun hubungan Anda saat ini, sikap legal yang tepat hendaknya tetap dilakukan.

Lalu, jika Anda menjadi pihak yang membutuhkan pinjaman atau sebagai debitur pastikan Anda membutuhkan dana tersebut bukan untuk kebutuhan konsumtif. Berikut langkah yang sebaiknya Anda tempuh jika Anda membutuhkan pinjaman ke teman atau saudara.

Pertama, ajukan dulu pinjaman ke bank atau institusi keuangan. Ada satu mitos yang beredar, bahwa kartu kredit itu jahat. Hal ini tidak sepenuhnya bisa

dibenarkan. Secara teori perencanaan keuangan, kartu kredit justru sangat bermanfaat. Salah satunya adalah untuk mengetahui kemampuan bayar kita terhadap kredit. Perbankan biasanya akan memeriksa *historical* kredit kita. Jika kredit Anda ditolak oleh bank, Anda baru dapat mengajukan alternatif meminjam ke teman atau saudara. Pastikan Anda memiliki *track record* yang baik soal keuangan di lingkungan sosial. Bawalah jaminan jika Anda hendak mengajukan pinjaman ke teman atau saudara dalam jumlah besar, bisa berupa BPKB atau mungkin surat berharga yang lain. Intinya, Anda harus memiliki jaminan yang jelas.

Sebaiknya semua transaksi pinjam meminjam dibuat tertulis secara legal, atau minimal ada bukti tertulis yang lainnya. Tujuannya agar jika dikemudian hari terjadi masalah yang tidak diinginkan, Anda punya dasar yang jelas dalam menyelesaikan masalah.

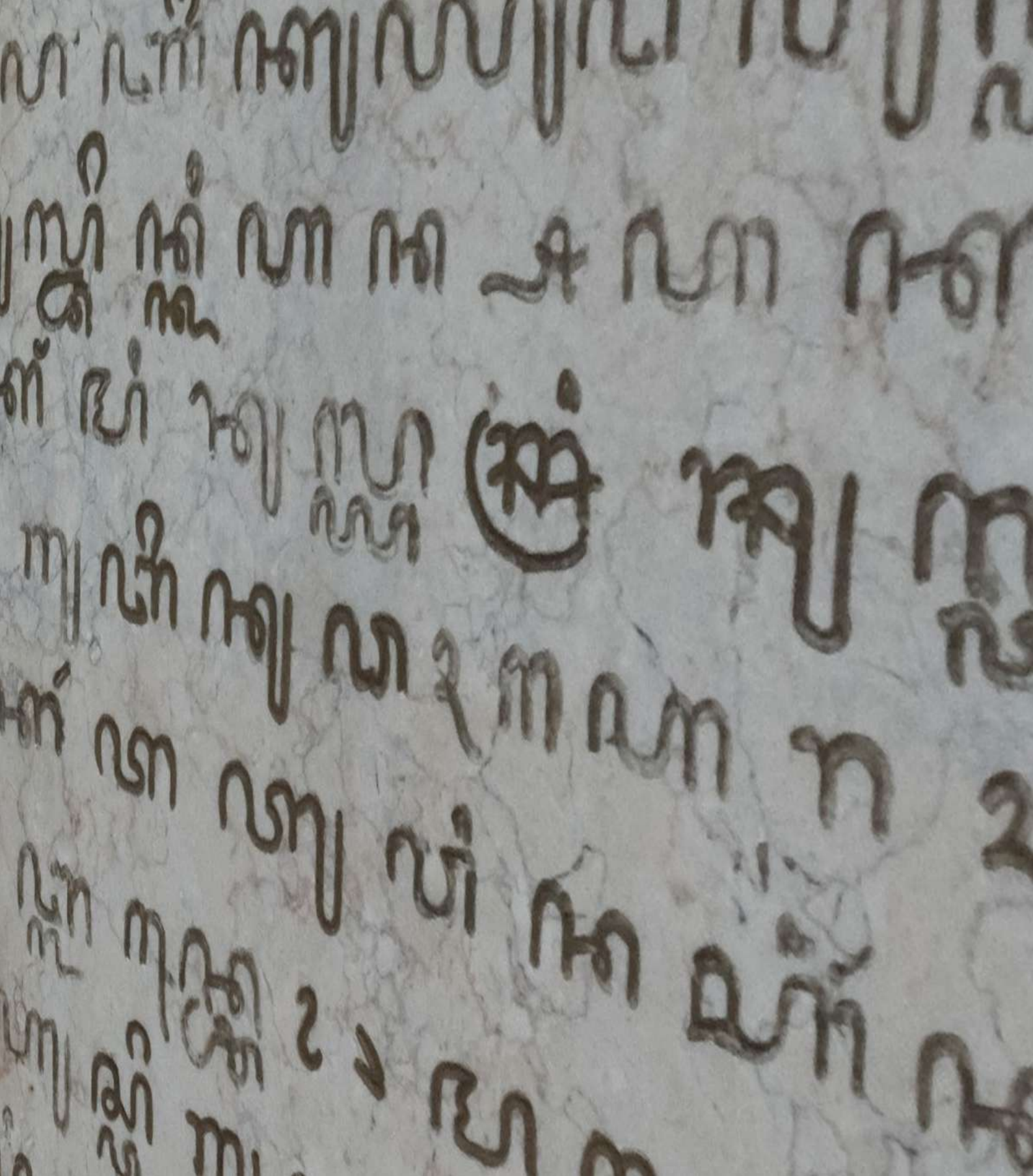
"Before borrowing money from a friend, decide which you need more. The Friend or The Money. Jaga kesehatan finansial Anda dan tentunya pertemanan Anda!

Mas Praim

"Hobi Kala Pandemi"

Cerita : Yani Kurnia A. Gambar : Ditto Novenska





HARI AKSARA INTERNASIONAL
8 SEPTEMBER 2020

Foto
Anas Nur Huda